

**PENGGUNAAN MODAL SOSIAL PEMIMPIN PEREMPUAN
DALAM POLITIK LOKAL**

Di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Sosial***

**OLEH :
HESTI TRIYANA SULISTYANI
NIM 125110800111035**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Hesti Triyana Sulistyani
NIM : 125110800111035
Program Studi : Antropologi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 25 Juli 2016



Hesti Triyana Sulistyani
NIM: 125110800111035

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Hesti Triyana Sulistyani telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 25 Juli 2016
Pembimbing



(Manggala Ismanto, M.A)
NIP.19880520 201504 1 003



HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Hesti Triyana Sulistyani telah disetujui oleh Dewan Penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.

(Edlin Dahniar Al-Fath, M.A), Ketua Dewan Penguji
NIK. 201508 870421 2 001

(Manggala Ismanto, M.A), Anggota Dewan Penguji
NIP.19880520 201504 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi

(Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum)
NIP. 196708032001121001



Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Syariful Muttaqin, M.A)
NIP. 19751101 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi S1 Antropologi di Universitas Brawijaya, Malang.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah penulis terima, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulisan skripsi ini berjalan sampai akhir.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
3. Yang terhormat, Bapak Manggala Ismanto, M.A., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sejak penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Yang terhormat, Ibu Edlin Dahniar Al-Fath, M.A., selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Yang terhormat, Ibu Renny Roslina selaku Kepala Desa di Desa Pakuncen yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan di desa setempat.

6. Yang terhormat Bapak Sunandir selaku Juru Kunci Makam di Desa Pakuncen yang telah berkenan memberikan informasi kepada penulis terkait sistem kepemimpinan di Desa Pakuncen.
7. Yang tercinta Ayah dan Ibu, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Yang tercinta kedua kakakku yakni Endang S. dan Slamet S. yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Yang terkasih teman-teman angkatan 2012, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Dan, terakhir terkhusus kepada teman-teman tercinta yakni Rina Naning Hidayah, Asa Medianti, Mustika Maharani dan Meiliani C.I.S yang telah menemani dan membantu penulis dalam setiap proses skripsi ini diucapkan terimakasih banyak.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Juli 2016

Penulis

Abstrak

Hesti Triyana Sulistyani 2016, *Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan dalam Politik Lokal Di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk*. Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing: Manggala Imsmanto M.A.

Kata Kunci: *Lineages*, Persepsi Kepemimpinan Perempuan dan Modal Sosial

Peraturan pemerintahan dalam UUD No. 5 Tahun 1979 Pasal 5 Tentang Pemerintahan Desa mengubah cara pemilihan kepala desa. Cara pemilihan kepala desa di Desa Pakuncen dulunya secara *lineages*, setelah adanya peraturan tersebut pemilihan kepala desa berubah menjadi demokrasi. Penelitian ini mencoba mencari jawaban atas (1) bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dan (2) bagaimana kepala desa perempuan menggunakan modal sosial yang dimilikinya. Penelitian ini dilakukan di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep gender dan teori modal sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Pakuncen ini dulunya dipimpin oleh laki-laki meskipun sudah ada peraturan yang menyatakan perempuan juga bisa menjadi kepala desa dalam UUD No 5 Tahun 1979 Pasal 4. Hal ini memberi peluang bagi perempuan untuk berkiprah di ranah politik. Mulai tahun 2009 ada seorang perempuan yang dicalonkan oleh masyarakat dari organisasi pengajian untuk menjadi kepala desa. Dukungan tersebut dilatarbelakangi pentingnya isu putra daerah oleh masyarakat desa setempat, tetapi tidak hanya itu saja yang menjadi pertimbangan masyarakat. Masih banyak modal sosial yang dimiliki kepala desa perempuan, sehingga masyarakat percaya padanya. Kepemimpinan perempuan ini menimbulkan persepsi baru dari masyarakat tentang kemampuan kepala desa perempuan dalam memimpin desa.

Abstract

Hesti Triyana Sulistyani 2016, *Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan dalam Politik Lokal Di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk*. Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing: Manggala Imsmanto M.A.

Keywords: Lineages, Perception of Women's Leadership and Social Capital

The government regulations in the UUD No. 5 Years 1999 Pasal 5 about The Governments of the village changed the way village head. The way for the village head in the village Pakuncen once in lineages, after these regulations village head turned into a democracy. This research trying to find the answers to (1) how the civil society perception in leadership women and (2) how the village head of women using her social capital. This research was conducted in the village of the District Pakuncen, Patianrowo-Nganjuk. Using qualitative research methods. This research using the concept of gender and social capital theory.

The results of this research indicates that in Pakuncen village was once led by men despite the rules that women can also became a village head in the UU No. 5 Years 1999 Pasal 4. This gives a chance for women to actively involved in the political. Starting in 2009 was a women who were nominated by the civil society of the organization recitation to become village head. This support based on the importance of the issue of son of the local village local civil society, but not just that is all into consideration the civil society. There are still many of social capital owned by the village head of women, so civil society trust with her. Women's leadership raises new perception of civil society about the ability of village head of women in to lead the village.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori	
1.4.1 Penelitian Terdahulu	8
1.4.2 Kerangka Teori	
A. Gender	13
B. Modal Sosial	14
1.5 Metode Penelitian	16
1.5.1 Pemilihan Lokasi	17
1.5.2 Pemilihan Informan	18
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	22
1.5.4 Analisis Data	24
1.6 Sistematika Penulisan	27
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA PAKUNCEN	
2.1 Keadaan Geografis	29
2.2 Keadaan Demografi Masyarakat	31
2.3 Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat	
2.3.1 Mata Pencaharian	32
2.3.2 Pendidikan	34
2.3.3 Agama	35
2.3.4 Organisasi Sosial	36
2.4 Struktur Politik Desa	37
2.5 Sejarah Terbentuknya Kadipaten Posono dan Kepemimpinannya	38
2.6 Terbentuknya Tanah Perdikan Pakuncen	41
BAB III: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN	
3.1 Kepemimpinan Kultural Desa Pakuncen	44
3.2 Pergeseran Kekuasaan dan Peran Juru Kunci Desa Pakuncen	48

3.3 Kecakapan Kepala Desa dalam Menlankan Tugas	53
3.4 Kepala Desa Perempuan Mampu Mempengaruhi Masyarakat Desa dalam Menjalankan Prokernya	65
3.5 Persepsi Masyarakat terhadap Kekuasaan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan	69

BAB IV : MODAL SOSIAL KEPALA DESA PEREMPUAN

4.1 Putra Daerah Menjadi Isu Penting dalam Politik	75
4.2 <i>Bondo Sitik Iso</i> Menang	82
4.3 Antusias Masyarakat dalam PILKADES	96

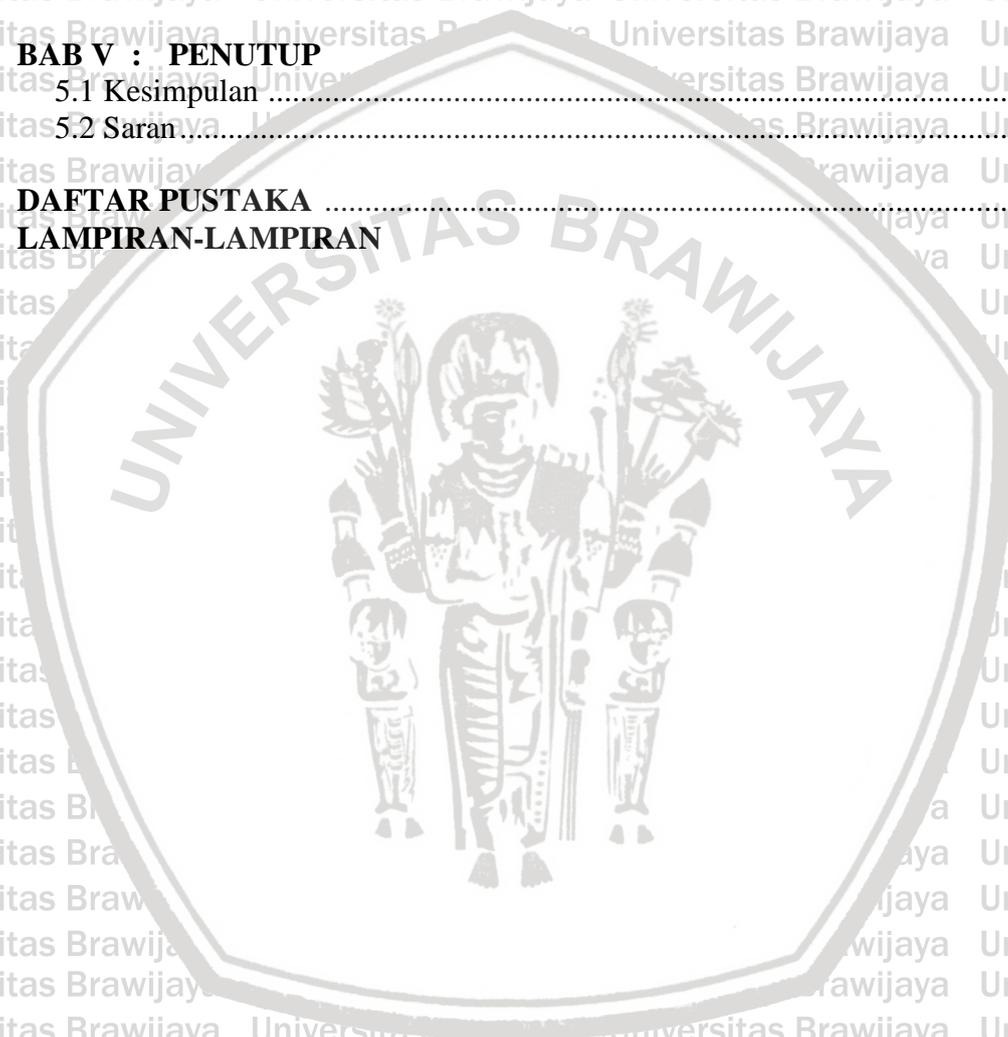
BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Pakuncen	30
Gambar 3.1 Cungkup Pertama	50
Gambar 3.2 Cungkup Utama	51
Gambar 3.3 Rumah Usaha	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Kunci	19
Tabel 1.2 Informan Utama	19
Tabel 1.3 Informan Pendukung	20
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	32
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Pakuncen Tahun 2015	33
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat	35
Tabel 3.1 Susunan Silsilah Juru Kunci Makam Pakuncen	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Desa 37



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai kegiatan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan politik. Politik sendiri dapat dijumpai dalam berbagai bentuk misalnya, disuatu negara yakni ada pihak yang memerintah, dan ada pihak lain yang diperintah (Sudijono, 1995: 3). Kegiatan semacam itu tidak hanya dapat ditemukan pada tingkat negara, tetapi juga pada tingkat desa. Desa Pakuncen misalnya, di desa tersebut ada seorang pemimpin yang disebut dengan kepala desa. Kepala desa yang pada dasarnya bertugas untuk memerintah masyarakatnya, sedangkan pihak lain yang dimaksud untuk diperintah dalam konteks ini adalah masyarakat Desa Pakuncen sendiri. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Ramlan dalam Sudijono, 1995: 2).

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani: *Polis*. Politik sering diartikan sebagai Negara Kota (*city-state*). Kata *polis* memiliki banyak istilah, seperti *polities* (warga negara) yang dalam bahasa Inggris disebut *citizen* dan *pliticos* yang berarti kewarganegaraan (*civic*) (Gilchrist dalam Halim, 2014: 1).

Beberapa bentuk kata dari kata politik ini menunjukkan bahwa secara konseptual politik berakar dari peradaban Yunani. Tema politik sudah menjadi perbincangan serius para filosof Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Kedua filosof ini memandang politik sebagai upaya manusia menciptakan tatanan

masyarakat yang baik. Politik diposisikan sebagai ruang bersama, dimana setiap individu berjuang meningkatkan bakat dan kehidupannya (Halim, 2014: 1).

Sedangkan secara terminologis politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Peter dalam Halim, 2014: 1).

Secara garis besar pengertian politik merupakan seni mengatur kolektivitas yakni terdiri atas beragam individu yang berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama (Halim, 2014: 1). Pada dasarnya sebuah kegiatan yang termasuk dalam kegiatan politik berawal dari adanya sebuah interaksi sosial yang terdapat pada hubungan bermasyarakat dalam ruang. Ruang yang telah ada atau sengaja disediakan guna memfasilitasi keberlangsungan politik. Misalnya lembaga ketatanegaraan mulai dari tingkat internasional, nasional, dan lokal yang selanjutnya dilaksanakan oleh para anggota legislatif seperti kepala desa.

Kegiatan politik pada zaman dahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada cara pemilihan pemimpinnya. Seperti halnya di Desa Pakuncen, dulu politik lokal yang diterapkan disana sangat tergantung pada garis keturunan atau *liniages*, tetapi seiring berkembangnya zaman mengakibatkan terjadinya perkembangan.

Perkembangan politik yang terjadi di Desa Pakuncen yakni mulai diselenggarakannya pemilihan umum yang disebut dengan PILKADES. Maka dapat diketahui bahwa politik seterusnya akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perubahan tersebut tidak terlepas dari masyarakat yang memiliki harapan dan tujuan yang sama yakni ingin menikmati kehidupan yang lebih baik. Agar tetap berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengatur berbagai

kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma dan kaidah-kaidah tersebut mengharuskan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi atau otoriter untuk mengatur semua kegiatan masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam UU terkait kegiatan pemilu yang diatur dalam UUD RI No. 5 Tahun. 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan tidak selalu bersifat pasti, karena akan berubah sesuai kebutuhan masyarakat yang menciptakan adanya perubahan. Perubahan peraturan akan terus terjadi pada semua aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Perubahan terjadi pada hampir semua wilayah mulai dari perkotaan yang masyarakatnya sangat kompleks hingga pedesaan, seperti di Desa Pakuncen. Desa Pakuncen mengalami perubahan pada aspek politiknya. Perubahan tersebut ditunjukkan dalam proses pemilihan kepala desa.

Pada zaman dahulu di Desa Pakuncen, seorang kepala desa dipilih tidak melalui PILKADES. Melainkan dipilih berdasarkan garis keturunan dari kepala desa sebelumnya. Kepala desa pertama kali dipilih karena pertimbangan sebagai pemilik awal tanah atau orang yang membabat alas Desa Pakuncen, sehingga dia adalah orang yang pertama menjabat sebagai kepala desa. Beberapa tahun kemudian setelah masa jabatan kepala desa pertama usai, maka yang menjadi penerus yakni berasal dari keturunannya.

Keturunan yang bisa menjabat sebagai kepala desa selanjutnya di Desa Pakuncen adalah anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki dari keturunan kepala desa pertama. Pemilihan kepala desa secara turun temurun tersebut sekarang ini sudah berubah. Perubahan tersebut dikarenakan adanya persetujuan

dari masyarakat setempat terhadap persyaratan administrasi negara di Indonesia.

Diatur dalam UUD RI No. 5 Tahun.1979 pasal 5 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi “Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk Desa Warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin”

Peraturan perundang-undangan tersebut mengubah sistem pemilihan Kepala desa di Desa Pakuncen terhadap perubahan budaya politik yang diterapkan sebelumnya. Perubahan politik yang dilakukan adalah mengubah cara pemilihan kepala desa yang awalnya dipilih berdasarkan keturunan kepala desa pertama, sekarang berubah dengan diadakannya PILKADES (pemilihan kepala desa) seperti yang dijelaskan di atas. Perubahan tersebut disetujui oleh warga, sehingga semua warga Desa Pakuncen memiliki hak sebagai pemimpin. Semua warga berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala desa untuk memimpin desanya. Selama empat periode ini pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara mengadakan PILKADES.

Sekarang ini sudah banyak organisasi-organisasi yang memperjuangkan gender seorang perempuan dalam hal kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan gender dalam penelitian ini merujuk pada kesetaraan gender pada ranah politik lokal di Desa Pakuncen. Kesetaraan gender tersebut membuat para perempuan mulai banyak mengekspresikan kemampuannya dalam ranah politik. Di Desa Pakuncen misalnya, Di desa ini dipimpin oleh seorang perempuan selama dua periode pemilihan kepala desa. Hal tersebut didukung oleh

UUD RI No. 5 Tahun.1979 Pasal 4 tentang Pemerintahan Desa pada beberapa

point huruf yang menunjukkan bahwa pencalonan kepala desa tidak harus laki-laki, tetapi perempuan juga memiliki peluang untuk mencalonkan diri. Syarat yang dimaksud adalah peserta calon harus beragama, seorang WNI, berpendidikan, berdomisili di desa tersebut selama satu tahun.

Peraturan terkait pemilu memang sudah diatur sejak tahun 1979 dalam UUD RI No. 5, tetapi baru dilaksanakan di Desa Pakuncen pada tahun 1992.

Berdasarkan observasi awal pada tahun 1992 baru dilaksanakan PILKADES di Desa Pakuncen, karena baru dimusyawarahkan dengan warga dan disepakati untuk dilaksanakan PILKADES. Kesepakatan tersebut dilatarbelakangi oleh warga yang menginginkan perubahan dari politik *liniages* menjadi demokrasi.

Meskipun kesepakatan sudah dilaksanakan seperti yang dimaksud dalam UUD RI No. 5 Tahun. 1979 Pasal 4 tentang Pemerintahan Desa seperti yang dijelaskan di atas, tetapi yang mencalonkan diri sebagai kepala desa Pakuncen tetap diduduki oleh seorang laki-laki selama dua periode lamanya. Selanjutnya ada seorang perempuan yang bersedia mencalonkan dirinya sebagai calon kepala desa untuk memimpin Desa Pakuncen.

Periode selanjutnya Desa Pakuncen dimenangkan dan dipimpin oleh kepala desa perempuan. Perempuan tersebut mencatat sejarah bahwa seorang perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah desa. Perempuan tersebut menjabat selama dua periode yang sedang berjalan yakni 5 tahun periode pertama dan berjalan 3 tahun periode kedua. Sikap berani untuk mencalonkan diri tersebut sudah menjadi salah satu bukti bahwa seorang perempuan yang pada umumnya bekerja pada ranah domestik, juga mampu bersaing pada ranah non-

domestik. Hal tersebut membuktikan adanya peran perempuan dalam ranah politik memiliki peluang dan mendapat kepercayaan dari warga untuk memimpin desanya. Perempuan yang pada umumnya hanya dipandang sebagai seorang yang lemah dalam hal politik.

Menurut pandangan masyarakat Jawa perempuan hanya memiliki peran dalam ranah domestik atau *konco wingking* bagi laki-laki, seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus suami serta anak. Adanya peluang dan kepercayaan tersebut menjadikan perempuan ingin membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pekerjaan non-domestik yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki, tetapi di Desa Pakuncen hal tersebut sudah mulai luntur. Perubahan peran oleh perempuan tersebut yang menjadikan alasan dalam pemilihan judul penelitian ini yakni

“Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Pakuncen terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana kepala desa perempuan menggunakan modal sosial yang dimilikinya untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kepala desa di Desa Pakuncen untuk memimpin desanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni

1. Mengetahui persepsi masyarakat Desa Pakuncen terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui cara kepala desa perempuan menggunakan modal sosial yang dimilikinya untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kepala desa di Desa Pakuncen untuk memimpin desanya.

1.4 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1.4.1 Penelitian Terdahulu

Pengantar antropologi politik dibahas oleh Donald V. Kurtz dalam bukunya yang berjudul "*Political Anthropology Power and Paradigms*" (2001).

Terkait pemahaman politik dengan antropologi dibahas pada sub bab "*The Paradigms of Political Anthropology*". Politik memiliki implikasi dua kata yang

kompleks dan tumpang tindih antara *politics* dan *political*. Perbedaan dari keduanya terletak pada bagaimana kualitas organisasi, struktur, dan prosesnya.

Keduanya memberi orientasi yang berbeda dan penting untuk analisis materi pembelajaran antropologi politik. Antropologi politik mencoba menganalisis fenomena politik dengan memfokuskan pada struktur sosial-politik; *lineages* (keturunan) atau sistem politik; "*chiefdoms or the state*". Selain itu antropologi

politik juga mengacu pada bagaimana praktek dari para agen yang beroperasi dalam struktur politik dan sistem atau beberapa cara yang terkait dengan hal tersebut, ilmu antropologi mencoba mengeksplor bagaimana agen politik seperti pemimpin, penggunaan ketrampilan, kekuatan, kelicikan, kebijaksanaan, dan banyak lagi strategi lainnya yang dilakukan oleh agen politik. Berbagai strategi dilakukan untuk mengejar dan mencapai tujuannya mendapat kedudukan politik.

Pada sub bab lain yang berjudul *The Politics of Kinship* karya Robin, dalam buku Donald V. Kurtz. Robin meneliti tentang *Kinship* (keturunan) dalam disiplin ilmu antropologi pada tahun 1865-1967. Latar belakang Robin melakukan penelitian terkait politik yang fokus pada hubungan kekeluargaan dianggap masih

sangat kurang. Sehingga dia melakukan penelitian tersebut agar dapat digunakan sebagai literatur atau daftar pustaka pada penelitian selanjutnya. Robin membahas bagaimana esensi sistem kekeluargaan dan struktur organisasi yang rumit, sebelum pemeran politik memasuki ranah sosial dan kebudayaan yang bersifat dinamis. Dalam penelitiannya Robin menjelaskan juga bagaimana perkawinan adat dan garis keturunan yang dianut. Robin menemui kesulitan dalam penelitiannya yakni mencari data lapangan tentang fungsi dan pola perubahan politik kekeluargaan seperti dimensi politik dari garis keturunan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Robin ini berbeda dengan penelitian selanjutnya terletak pada tingkat politiknya. Penelitian tentang politik dalam penelitian Robin terletak pada tingkat kecil yakni keluarga, sedangkan pada penelitian selanjutnya politik pada tingkat desa.

Buku Lisa Bona Rahman, Wdriana Noerdin, dkk (tim penulis) yang berjudul "*Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*" (2005). Buku ini berisi tentang bagaimana ruang perempuan dalam ranah politik lokal berdasarkan peraturan daerah (Perda) dimasing-masing daerah yang dijadikan obyek penelitian. Ada 10 daerah yang dijadikan obyek dalam penelitian ini yakni Sukabumi, Tasikmalaya, Solok, Mataram, Nangro Aceh Darusalam (NAD), Gianyar, Kupang, Kendari, Samarinda, dan Kutai Barat. Mereka melibatkan pemerintahan daerah setempat untuk memberi tahu dan menjelaskan perda yang berlaku di daerahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berperspektif feminis dalam analisis tekstual. Perda yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif feminis guna

melihat bagaimana ruang perempuan dalam politik lokal. Perempuan, dalam buku ini dijelaskan bahwa tugas mereka hanya berada pada ranah domestik atau di dalam rumah saja.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana representasi perempuan tersebut mempengaruhi isi PERDA dan apakah peraturan tersebut berpotensi menjadi deskriminasi terhadap perempuan. Meski sudah ada pemerintahan daerah yang sadar akan kesetaraan dan tidak ada deskriminasi gender, tetapi kurang mempresentasikannya dalam ranah politik lokal. Hal tersebut dapat diketahui dari kebijakan pemerintah daerah yang lebih memberikan pelatihan-pelatihan yang kapasitas kerjanya di dalam rumah saja seperti memasak, menjahit, dan kesejahteraan keluarga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal juga kurang dilibatkan. Kekurangan dalam penelitian hanya menjabarkan representasi perempuan dalam perda, sehingga peneliti selanjutnya ingin melanjutkan penelitian yang belum dibahas.

Penelitian selanjutnya ingin meneliti perubahan perempuan dalam ranah politik lokal yang mengacu pada persepsi warga di Desa Pakuncen.

Menurut Liza Hadiz dalam kumpulan jurnal *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma* (2004), dalam jurnal tersebut Liza menulis karya dalam sub bab yang berjudul *Partisipasi dan Kesetaraan Politik*

Gender dalam Pembangunan. Dalam karyanya tersebut Liza membahas tentang partisipasi perempuan pada ranah politik. Politik yang menjadi fokus dalam bahasannya yakni terkait kesetaraan gender. Kesetaraan gender tersebut diperoleh dari pertemuan di Mexico city selama dua minggu 19 Juni – 2 Juli 1975, bertajuk

“Konferensi Sedunia Tahun Perempuan Internasional” (*World conference of the international Women’s Year*). Ada tiga bahasa dari pertemuan tersebut yang dijelaskan oleh Liza yakni penyeteraan gender dan penghapusan diskriminasi gender, pengintegrasian, dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan kontribusi perempuan dalam perdamaian dunia.

Dengan adanya tiga isu pokok tersebut menimbulkan adanya pergeseran sudut pandang partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian selanjutnya terkait peran perempuan dalam ranah politik, tetapi belum dibahas mengenai persepsi pada suatu masyarakat, sehingga peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat dalam menanggapi perubahan peran perempuan dalam politik lokal di Desa Pakuncen.

Penelitian terkait perempuan dalam ranah politik sudah banyak diteliti, salah satu oleh Robert Endi Jaweng yang berjudul *Infrastruktur, Integritas, dan prestasi Perempuan Kepala Daerah: perspektif Desentralisasi politik*” (2014).

Penelitian yang dilakukan olehnya membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Tidak hanya sekedar menghasilkan perubahan tata kelola pemerintahan di area lokal. Dia menemukan sederet perempuan yang berperan dalam ranah politik mulai dari level provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam penelitiannya dia mengambil salah satu kinerja walikota perempuan di Surabaya, Bu Trismaharani yang akrab dipanggil Bu Risma. Kinerja yang dilakukan oleh Bu Risma yakni memfokuskan pada tata kelola dan anggaran, pelayanan dasar, serta ekonomi rakyat, serta tata kota (taman dan ruang publik, bebas reklame besar).

Selain itu juga membahas modal sosial yang dimiliki oleh pemimpin perempuan dalam meraih kedudukan politik. Modal sosial yang dimiliki oleh Bu Risma adalah *trust public* (*public service is public trust*). *Public service is publik trust* yang dimiliki oleh Bu Risma yakni dia membangun jalur kariernya sebagai birokrat tulen. Dilihat dari latar belakang pekerjaannya sebelum menjadi seorang wali kota dia menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Surabaya. *Trust public* dia buktikan dengan keberhasilan meraih 6 penghargaan nasional/internasional pada tahun kerja pertamanya (2010). Disamping itu Robert juga membahas motif perempuan-perempuan tersebut yang ingin berkarier di kancha dunia politik yang terkesan kotor tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan selanjutnya terkait modal sosial yang dimiliki pemimpin perempuan, tetapi yang membuat berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti melakukan penelitian pada level atau tingkat desa. Perbedaan kebudayaan pada setiap tingkat pemerintahan lokal akan memberi sudut pandang yang berbeda juga dalam menyingkapi dan pengambilan keputusan pemerintahan oleh pemimpin perempuan.

1.4.2 Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan dalam penelitian, karena teori berguna sebagai macam sistem penyimpanan yang membantu para peneliti untuk menganalisis data-data hasil penelitian lapangan agar lebih relevan. Teori juga dapat membantu peneliti untuk mempermudah penganalisaan, lebih terarah, efisien, dan sistematis.

Sebagai berikut kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Gender

Konsep gender menurut Tri Marhaeni Pudji Astuti (2011: 3) dalam bukunya yang berjudul Kontruksi Gender dalam Realitas Sosial. Konsep Gender menurutnya adalah suatu sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya konstruksi masyarakat secara sosial-budaya karena proses konstruksi berlangsung secara terus-menerus dan dilanggengkan dalam berbagai nilai dan norma sosial yang terdapat pada masyarakat, sehingga seolah-olah sifat laki-laki dan perempuan melekat pada masing-masing individu.

Misalnya sifat perempuan yang melekat pada dirinya adalah individu yang lemah lembut, emosional, keibuan, cantik, menerima apa adanya dan penurut serta tidak macam-macam. Sedangkan sifat laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan jantan. Menurutnya sifat yang telah dikonstruksikan tersebut bisa saja bertukar dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu.

Perbedaan yang ditimbulkan dari paparan di atas adalah mengakibatkan adanya ketidakadilan gender pada laki-laki atau perempuan salah satunya stereotip.

Stereotip yang ada sampai saat ini lebih banyak bersifat negatif untuk perempuan

dan positif untuk laki-laki. Pelabelan tersebut lebih mengarah pada perbedaan peran-peran sosial diantaranya (Astuti, 2011: 5).

Meskipun ada perbedaan diantara perempuan dan laki-laki mereka sama-sama menjadi pelaku dalam hal pembangunan. Dalam kedudukan sebagai pelaku pembangunan keduanya memiliki peran yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menikmati hasil dari pembangunan. Sehingga tidak adil apabila pada zaman modern seperti sekarang ini perempuan tetap dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan khususnya dalam hal ranah politik.

B. Modal Sosial

Teori modal sosial menurut John Field dalam bukunya yang berjudul *Social Capital*. John menekankan bahwa modal sosial itu berawal dari dua kata yakni “soal hubungan”. Menurutnya upaya membangun suatu hubungan dengan sesama manusia dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan hingga sepanjang masa. Hubungan dengan sesama manusia maksudnya adalah adanya hubungan sosial. Hubungan tersebut akan membantu seseorang dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan, karena seseorang tidak dapat mencapai dengan upaya sendiri tanpa bantuan orang lain khususnya yang ada di sekitarnya. Melalui serangkaian jaringan orang dapat melakukan hubungan, menurut John sejauh mana hubungan tersebut akan menjadi sebuah daya maka dapat dikatakan sebagai modal sosial (John, 2014: 1-2).

Jaringan dibutuhkan dalam setiap hubungan, karena terdapat prosedur-prosedur yang disepakati untuk mengajukan atau mengambil keputusan, dan tanggung jawab. Hal tersebut biasanya dilihat berdasarkan pertimbangan posisi dari pada berdasarkan pertimbangan pribadi. Namun kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mengabaikan pertimbangan posisi seseorang, tetapi lebih mempertimbangkan kepribadian seseorang.

Untuk mewujudkan berbagai hal, seringkali orang meminta bantuan kepada orang-orang terdekat, orang yang mereka kenal, teman, dan keluarga. Cara tersebut dianggap lebih cepat membuahkan hasil. Jadi jaringan yang dimiliki seseorang sangatlah penting untuk mencapai berbagai tujuan. Dalam sebuah jaringan sosial yang terpenting adalah bukan apa yang kamu ketahui, tetapi siapa yang kamu kenal. Mengenal banyak orang saja belum dikatakan cukup, karena belum tentu orang lain merasa harus membantu Anda. Agar orang lain bersedia membantu Anda, maka Anda harus membuatnya percaya dengan Anda sehingga bersedia membantu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan ada kesamaan nilai, karena orang lain cenderung bersedia melakukan kerja sama untuk tujuan bersama (John. 2014: 3-4).

Serangkaian jaringan di dalamnya juga terdapat kepercayaan dari orang-orang sekitar. Dalam modal sosial, jelas sekali bahwa kepercayaan juga memiliki peran dalam merepresentasikan berbagai cara untuk mengkses sumber daya. Kepercayaan dari seseorang terhadap Anda memiliki peran yang sangat vital dalam memperoleh akses manfaat dari

jaringan sosial (John, 2014: 103). Secara umum semakin banyak orang yang Anda kenal dan memiliki kesamaan persepsi, maka akan semakin banyak atau kaya modal sosial yang dimiliki.

1.5 Metode Penelitian

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (fleksibel) guna mencapai tujuan penelitiannya, karena seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah yang akan digunakan untuk membantu mendapat data dari lapangan. Bagian ini akan mendeskripsikan tentang jenis penelitian yang disusun oleh peneliti, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Penelitian merupakan suatu proses untuk mencari sesuatu dengan cara yang terstruktur dalam waktu yang lama. Ketika mencari suatu data lapangan seorang peneliti harus menggunakan metode ilmiah dengan mentaati aturan-aturan dalam metode yang digunakan. Metode yang dapat digunakan harus sesuai dan berhubungan dengan inti dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu peneliti juga harus memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian atau turun lapangan (Nazir, 2005: 84).

Menurut Marshal dalam Jonathan, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (2006: 193). Dari definisi tersebut dapat ditarik kata kunci bahwa dalam penelitian kualitatif yakni

proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam suatu penelitian maksudnya memerlukan waktu dan kondisi yang suka berubah-ubah, sehingga bersifat fleksibel. Pemahaman mempunyai arti bahwa peneliti dalam melakukan penelitian hendaknya memahami permasalahan dari konteks masalah yang diteliti, oleh karena itu peneliti tidak boleh mengambil jarak dengan orang yang diteliti agar dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang dijadikan masalah. Kompleksitas memberikan gambaran pada peneliti bahwa fokus penelitian bersifat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Interaksi, terjadi pada semua makhluk hidup terutama manusia. Maka seorang peneliti sebaiknya selalu bertanya terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sasaran utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia, karena manusia sumber masalah sekaligus penyelesai dari masalah itu sendiri (Jonathan, 2006: 193-194).

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dipandang lebih mendukung penelitian ini dalam mendapatkan data di lapangan. Hasil penelitian ini tidak memasukkan data angka, karena sesuai dengan pengambilan rumusan dalam penelitian ini yang menyelidiki dan mengetahui modal sosial yang dimiliki oleh seorang kepala desa perempuan di Desa Pakuncen. Selain itu juga membantu dalam memahami persepsi masyarakatnya terhadap perubahan peran perempuan dalam ranah politik lokal.

1.5.1 Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dan berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Adapun beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih Desa

Pakuncen, karena terjadi pergeseran kekuasaan kepemimpinan juru kunci ke

kepala desa. Juru kunci sekaligus sebagai kepala desa berubah status hanya

menjadi juru kunci saja sejak tahun 1992, karena ada peraturan pemerintah yang

mengatur tentang pemerintahan desa salah satunya adalah kepala desa dipilih

langsung oleh masyarakat secara terbuka. Kepala desa dalam penelitian ini

difokuskan pada periode kepala desa perempuan. Notabennya seorang perempuan

itu diidentikkan dengan istilah “*Konco Wingking*” oleh orang Jawa. Maksud dari

istilah tersebut adalah seorang perempuan ranah atau ruang lingkup kerjanya di

domestik yang melakukan berbagai pekerjaan rumah seperti memasak, mengurus

suami dan anak, membersihkan rumah, serta pekerjaan lainnya, sedangkan pada

ranah non-domestik diidentikkan dengan pekerjaan seorang laki-laki. Pekerjaan

domestik yang identik dengan perempuan tersebut sudah mulai bergeser di Desa

Pakuncen dapat dilihat pada kedudukan atau jabatan seorang kepala desa yang

dipegang oleh perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan juga

mampu bekerja dan bersaing dengan laki-laki pada ranah politik lokal.

1.5.2 Pemilihan Informan

Untuk mencari informasi dan data terkait penelitian, peneliti membagi

informan ke dalam tiga kategori. Informan yang dipilih akan diwawancarai selama

penelitian berlangsung (Suyanto dan Sutinah, 2005: 171-172):

1. Informan kunci (*key informan*) yakni orang-orang yang memiliki dan mengerti berbagai informasi terkait bahasan yang menjadi penelitian.

Informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Kunci

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Pak Su	35	Laki-laki	Juru Kunci Makam
2	Ibu Agustin	30	Perempuan	Staff Pembantu
3	Ibu I	47	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
4	Ibu Sri	46	Perempuan	Ibu Rumah Tangga

Sumber: Data hasil penelitian di Desa Pakuncen

Menurut tabel 1, informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.

Informan tersebut di atas dipilih dengan berbagai pertimbangan yakni Pak Su selaku juru kunci makam yang mengerti sejarah kepemimpinan Desa Pakuncen sebelum dan sesudah dilaksanakannya PILKADES. Ibu Agustin adalah staff pembantu yang dapat memberikan informasi terkait struktur organisasi Desa Pakuncen. Ibu I selaku mantan ketua PKK tahun 2006 yang diharapkan dapat memberi informasi tentang kepala desa perempuan dan kinerjanya ketika menjadi sekretaris PKK pada saat diketuai olehnya dan terkait proses awal pencalonan kepala desa perempuan. Ibu Sri selaku teman dekat dari kepala desa perempuan dapat memberikan informasi terkait sikap yang dimiliki kepala desa perempuan sebelum hingga setelah menjadi kepala desa di Desa Pakuncen. Informan utama yakni orang yang memiliki informasi untuk *cross check* data yang didapatkan dari informan kunci sebagai berikut:

Tabel 1.2 Informan Utama

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Ibu R	46	Perempuan	Kepala Desa

Sumber: Data hasil penelitian di Desa Pakuncen

Ia adalah orang yang sedang memerankan atau sebagai pelaku atau terlibat langsung dalam kegiatan terkait penelitian yakni politik, sehingga dapat dijadikan sebagai informan utama.

2. Informan pendukung yakni orang-orang yang terlibat ketika penelitian berlangsung.

Tabel 1.3 Informan Pendukung

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Mas A	25	Laki-laki	Ketua Karang Taruna Tahun 2015/2016
2	Pak B	30	Laki-laki	Buruh Tani
3	Pak Dadang	35	Laki-laki	Ketua BPD
4	Ibu Su	45	Perempuan	Buruh Tani
5	Ibu N	32	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
6	Pak R	35	Laki-laki	Wiraswasta
7	Ibu Komariyah	47	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
8	Pak So	49	Laki-laki	Buruh Tani
9	Ibu Siti	40	Perempuan	Wiraswata
10	Pak M	59	Laki-laki	Buruh Pabrik

Sumber: Data hasil penelitian di Desa Pakuncen

Informan pendukung yang berjumlah 10 orang ini dipilih karena dapat memberikan informasi tambahan mengenai kepemimpinan kepala desa

perempuan. Mas A selaku ketua karang taruna tahun 2015/2016 yang dapat memberikan informasi terkait pengadaan pembinaan wiraswasta penyablonan yang termasuk pendukung dalam program berkelanjutan “Desa Wisata”. Pak B adalah salah satu masyarakat yang mengalami kejadian *money politik* pada PILKADES sebelumnya, sehingga dapat memberikan informasi terkait cara kepala desa dalam mendapatkan suara. Pak Dadang selaku ketua BPD dapat memberikan informasi terkait hasil PILKADES dari kepala desa perempuan tahun 2009 dan 2014. Ibu Su selaku masyarakat yang bukan pendukung kepala desa perempuan pada periode pertama dengan alasan kekhawatir tidak akan mampu jika perempuan menjadi seorang pemimpin, tetapi pada periode kedua Ia mendukung Ibu R menjadi kepala desa. Ibu N adalah masyarakat yang mendukung lawan Ibu R pada periode pertama dan kedua. Diharapkan Ia dapat memberikan informasi tambahan terhadap keberhasilan kepemimpinan kepala desa perempuan yang bukan berasal dari pendukung kepala desa perempuan yakni Ibu R, sehingga Ia dapat menjadi saksi bahwa seorang perempuan juga mampu dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa atau pemimpin. Pak R adalah salah satu masyarakat setempat yang tidak setuju dengan program kerja Ibu R untuk mengadakan rumah usaha. Pak So dapat memberikan informasi terkait alasan memberikan dukungan kepala desa perempuan dan persepsi terhadap kepemimpinannya. Ibu Siti memberikan informasi terkait dukungan yang diberikan oleh anggota keluarganya untuk menjadi kepala desa. Ibu Komariyah selaku anggota pengajian yang dapat memberikan informasi terkait pencalonan. Sedangkan Pak M selaku mantan kepala desa pertama setelah dilaksanakannya

PILKADES di Desa Pakuncen pada tahun 1992 yang dapat memberikan informasi salah satu proses terpilihnya kepala desa perempuan. Para informan tersebut diambil dari masyarakat setempat, perwakilan anggota dari organisasi pengajian dan PKK, dan kepala desa sebelumnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis data. Metode ilmiah observasi dapat ditarik sebagai pengamatan yang meliputi fokus perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2002: 145). Data yang dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan turun lapangan. Selain itu peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi (Jonathan, 2006: 224-228):

- a. Observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.

Observasi awal dilakukan tanggal 20 Desember 2015 oleh peneliti dengan bertanya kepada salah satu masyarakat Desa Pakuncen yang membuka warung makan. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data dan informasi yang diperlukan. Maka peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku

dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Observasi tahap selanjutnya dilaksanakan tanggal 15 Maret 2016. Observasi pada tahap kedua ini peneliti langsung turun lapangan dan tinggal di salah satu rumah masyarakat dengan tujuan mempermudah peneliti mengamati sikap kepala desa perempuan terhadap masyarakat, begitu sebaliknya yakni masyarakat terhadap kepala desa perempuan. Disamping itu juga mengamati aktivitas masyarakatnya Desa Pakuncen. Tujuannya untuk memperoleh gambaran awal terkait kegiatan politik lokal, sehingga peneliti bisa mengetahui siapa saja orang yang memiliki andil dalam politik.

- b. Wawancara, dengan menggunakan teknik wawancara ini keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Wawancara secara intensif terkait politik lokal dilaksanakan tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016. Wawancara yang dilakukan peneliti ketika turun lapangan yakni dengan melakukan pembicaraan pada kepala desa perempuan yang selanjutnya diarahkan untuk bertanya terkait politik yang terjadi di Desa Pakuncen secara lengkap kepada juru kunci makam. Selanjutnya peneliti mencari informasi terkait sikap kepala desa perempuan kepada tuan rumah yang menjadi tempat tinggal selama penelitian yakni Ibu Sri. Ia adalah sahabat dari kepala desa perempuan, sehingga Ia dapat memberi banyak informasi terkait sikap yang dimiliki kepala desa perempuan sebelum

dan setelah menjadi kepala desa. Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum seperti yakni memulai dengan menanyakan apakah informan berasal dari Desa Pakuncen atau bukan hingga merambah ke kepemimpinan kepala desa perempuan. Hal ini membantu membantu peneliti memahami persepsi informan bukan persepsi peneliti.

c. Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang berguna bagi peneliti. Peneliti mengambil gambar pada beberapa bangunan dan situs peninggalan yang berkaitan dengan Desa Pakuncen. Pada saat observasi peneliti mengambil gambar kantor balai Desa Pakuncen, makam dari Kyai Nurjalipah dan keluarga Mataram, bangunan sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Meminta data dokumentasi administrasi desa sebagai penunjang data terkait kondisi geografi desa dan demografi masyarakat. Mengambil gambar benda-benda dan bangunan sejarah lainnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh juru kunci kesepuluh seperti gentong yang diyakini memiliki kekuatan gaib, pohon beringin, dan bagian dalam dari makam keluarga Mataram. Disamping itu peneliti juga merekam beberapa informasi ketika melakukan wawancara dengan informan.

1.5.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendetail dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang

dapat menjawab masalah dari rumusan masalah. Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16-19) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan-tindakan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik Kesimpulan Verifikasi

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang ditarik dan diverifikasikan baik dengan kerangka teori peneliti. Dalam artian makna yang

muncul dari data yang telah diuji dengan berbagai cara hingga diperoleh data yang valid dan akurat.



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini akan memaparkan alur penulisan dan membaginya ke dalam 5 bab. Peneliti akan memaparkan kepada pembaca agar bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh peneliti dalam peneliti ini.

Bab 1 peneliti akan menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori gender dan modal sosial. Didukung metode penelitian yang akan digunakan untuk mencari data terkait dengan penelitian.

Bab II membahas tentang gambaran umum Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang mencakup kondisi letak geografis, kegiatan ekonomi, sosial budaya yang terdapat di masyarakat Pakuncen, sejarah politik Desa Pakuncen yang pada awalnya kepala desa dipilih berdasarkan garis keturunan hingga berubah menjadi demokrasi.

Bab III membahas tentang temuan data lapangan di Desa Pakuncen sesuai dengan permasalahan pertama yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti akan membahas persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan. temuan data lapangan terkait hal tersebut dianalisis menggunakan konsep gender.

Bab IV memfokuskan pada permasalahan terkait penggunaan modal sosial yang dimiliki kepala desa perempuan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai

kepala desa. Dijelaskan juga bagaimana suasana kemenangan kepala desa perempuan pada PILKADES periode pertama dan kedua.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan ini berisi tentang garis besar jawaban dari rumusan masalah mengenai persepsi masyarakat setempat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan dan penggunaan modal sosial yang dimiliki kepala desa perempuan untuk mendapatkan kekuasaan menjadi kepala desa di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah alur dalam penelitian, sehingga akan terlihat jelas apakah penelitian yang disajikan ini mendukung, menolak, atau memperkaya penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM DESA PAKUNCEN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kondisi dan gambaran umum Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang meliputi keadaan geografis, demografi, dan sosial-ekonomi masyarakat. Kemudian akan dipaparkan sejarah Kadipaten Posono dan kepemimpinannya, karena masih ada keterkaitannya dengan asal mula terbentuknya tanah perdikan Pakuncen.

2.1 Keadaan Geografis

Secara administratif Desa Pakuncen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

Desa Pakuncen Kota Lama Kertosono merupakan daerah istimewa Kabupaten Nganjuk. Desa Pakuncen berjarak sekitar 7 km dari arah utara Kertosono. Tanah yang dimiliki Desa Pakuncen merupakan sedikit persawahan yang tidak begitu memuaskan hasilnya, selebihnya merupakan tegalan dan pekarangan yang digunakan sebagai pemukiman masyarakat. Desa Pakuncen berada dekat dengan pabrik yakni PG. Lestari sekitar kurang lebih 2 Km.

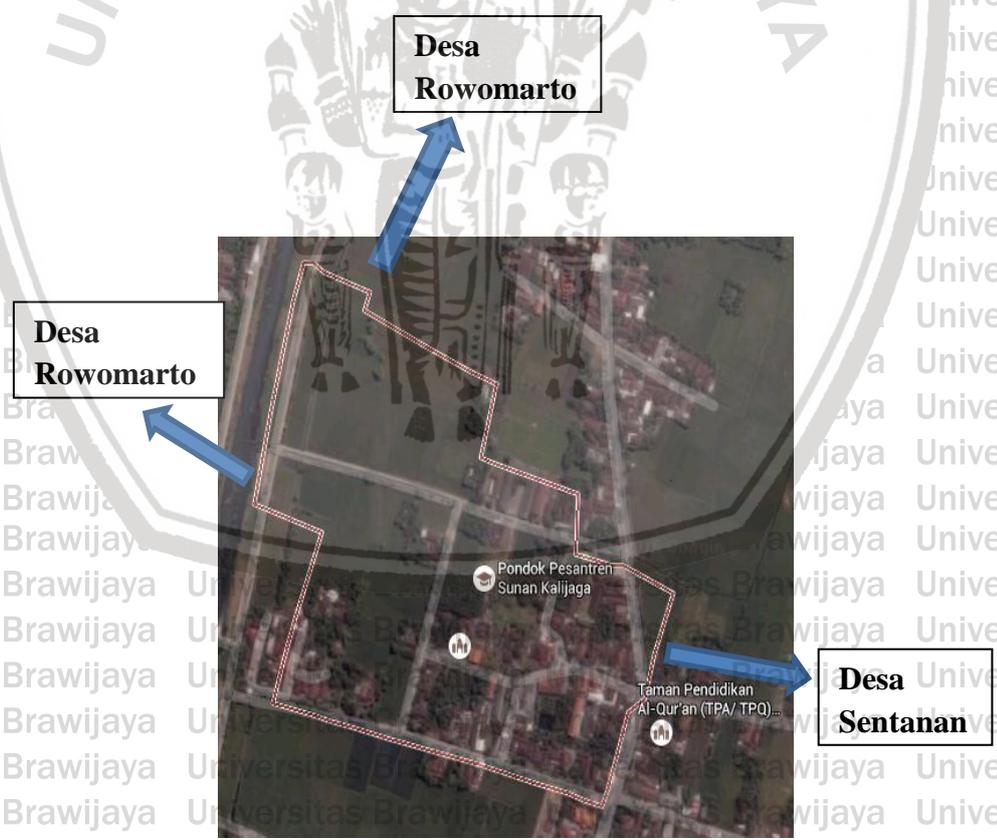
Secara geografis Desa Pakuncen yang berbatasan:

1. Sebelah Utara : Desa Rowomarto
2. Sebelah Selatan : Desa Patianrowo
3. Sebelah Barat : Desa Rowomarto
4. Sebelah Timur : Desa Ngrombot

Desa Pakuncen memiliki luas wilayah 11,7 Ha:

- 1. Lahan Sawah : 6 Ha
- 2. Lahan Ladang : - Ha
- 3. Lahan Perkebunan : - Ha
- 4. Lahan Peternakan : - Ha
- 5. Hutan : - Ha
- 6. Waduk/ Danau/ Situ : - Ha
- 7. Lahan Lainnya : 5,7 Ha

Sumber: Buku Administrasi Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2015.



Gambar 2.1 Peta Desa Pakuncen

Sumber : Internet (Google Map)

Desa Pakuncen memiliki jarak dari Pusat Pemerintahan Desa Pakuncen yang tergolong strategis. Bisa dilihat dalam buku administrasi desa tahun 2015 yakni jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1,5 Km; jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 25 Km, jarak dari Kota/ Ibukota Kabupaten 25 Km, dan jarak dari Ibukota Provinsi 86 Km. Apabila dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi mulai dari 10 menit hingga 2 jam dengan kecepatan 40/ Km.

2.2 Keadaan Demografi Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan administrasi Desa Pakuncen, tercatat jumlah masyarakatnya yang hanya berjumlah 96 KK yakni 323 jiwa.

Jumlah tersebut masih sangat jauh kurang untuk memenuhi persyaratan terbentuknya sebuah desa. Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 4 Tahun 1981 menetapkan bahwa desa bisa dibentuk apabila memiliki jumlah KK sebanyak 500 atau paling sedikit memiliki penduduk sebanyak 2500 jiwa, karena beberapa pertimbangan maka Pakuncen tetap dijadikan sebagai desa.

Untuk mendapatkan gambaran umum terkait jumlah masyarakat yang lebih jelas, maka dalam buku administrasi diklasifikasikan lagi berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1	Usia 0 – 17	96 Orang
2	Usia 18 – 56	192 Orang
3	Usia 56 Keatas	35 Orang
Jumlah Penduduk		323 Orang

Jumlah penduduk desa apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut jumlah laki-laki sebanyak 165 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 158 jiwa.

Sumber : Buku Administrasi Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2015

2.3 Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat

2.3.1 Mata Pencaharian

Secara geografis menyebutkan bahwa Desa Pakuncen tidak memiliki luas tanah untuk pertanian yang besar, sehingga ciri khas mata pencaharian masyarakatnya sebagai karyawan. Mata pencaharian masyarakat lakukan guna untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karyawan di pabrik gula Lestari dan *home industry* jamu milik pesantren Al-Qomar, PNS, dan TNI/ Polri. Sedangkan generasi mudanya banyak yang melakukan urbanisasi (perpindahan dari desa ke kota) untuk bekerja, karena dinilai lebih dapat membantu dalam hal ekonomi. Mereka merasa ketersediaan lapangan kerja di desa atau sekitar desanya sudah tidak memadai lagi. Berikut data mata pencaharian yang dimiliki masyarakat Desa Pakuncen:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Pakuncen
Tahun 2015

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan - Pegawai Negeri Sipil : 4 Orang - TNI/Polri : 1 Orang - Swasta : 28 Orang	33 Orang
2	Wiraswasta/ pedagang	22 Orang
3	Petani	9 Orang
4	Buruh Tani	12 Orang
5	Nelayan	- Orang
6	Peternak	- Orang
7	Jasa	9 Orang
8	Pengrajin	- Orang
9	Pekerja Seni	- Orang
10	Pensiunan	1 Orang
11	Lainnya	67 Orang
12	Tidak Bekerja/ pengangguran	170 Orang
Jumlah Total		323 Orang

Sumber: Data survey potensi ekonomi masyarakat Desa Pakuncen Tahun 2015

Data tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Pakuncen bukan sebagai petani. Hal tersebut bukan dikarenakan oleh musim atau cuaca yang kurang mendukung untuk bercocok tanam, tetapi dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang ada di Desa Pakuncen. Sehingga membuat masyarakat mencari pekerjaan lainnya selain di sektor pertanian yakni sebagai karyawan dan wiraswasta.

Terdapat lima golongan ekonomi masyarakat setempat yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Sebagai berikut rincian jumlah masyarakat berdasarkan penggolongan kesejahteraan keluarga yakni keluarga pra sejahtera 0 KK, Keluarga Sejahtera I 40 KK, Keluarga Sejahtera II 27 KK, Keluarga Sejahtera III 27 KK, dan Keluarga Sejahtera III plus sebanyak 2 KK. Penggolongan ini diadakan dengan alasan untuk mempermudah petugas desa yang menjadi panitia ketika ada bantuan dari pihak pemerintah misalnya sembako. Disamping itu juga bertujuan agar bantuan tersebut sampai pada orang yang benar-benar membutuhkan (Buku Administrasi Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2015).

2.3.2 Pendidikan

Pendidikan menjadi dasar sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia. Pendidikan yang baik akan membantu seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa globalisasi yang melanda dunia menjadi tantangan bagi masyarakat. Peningkatan dalam hal pendidikan pada suatu masyarakat akan mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik, karena memiliki wawasan yang lebih luas. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi individu dalam mengambil tindakan dan merespon suatu persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Di Desa Pakuncen terdapat dua kategori lulusan pendidikan di sana yakni lulusan pendidikan khusus dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Qomar

sebanyak 44 orang dan umum yang tersaji dalam tabel di bawah ini yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Pakuncen.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	20 orang
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	25 Orang
3	SMP/ Sederajat	27 Orang
4	SMA/ Sederajat	23 Orang
5	Akademi/ D1-D3	4 Orang
6	Sarjana 1	11 Orang
7	Sarjana 2	3 Orang
8	Sarjana 3	1 Orang

Selain tingkat pendidikan yang tersaji di dalam tabel, ada juga masyarakat yang tidak menyelesaikan sekolahnya bahkan ada juga yang tidak lulus dari sekolahnya berjumlah 7 orang pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sumber : Buku Administrasi Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2015.

2.3.3 Agama

Agama adalah hal yang penting untuk mendapat pengakuan identitas seseorang. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pakuncen semuanya beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pakuncen menganut paham atau aliran Nahdhatul Ulama (NU) didukung dengan adanya ponpes Al-Qomar di tengah-tengah desa, sehingga nuansa budaya Islam sangat terasa. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan keagamaan masyarakat ketika upacara kematian, kelahiran, tahlilan, yasinan, dan kegiatan keagamaan lainnya.

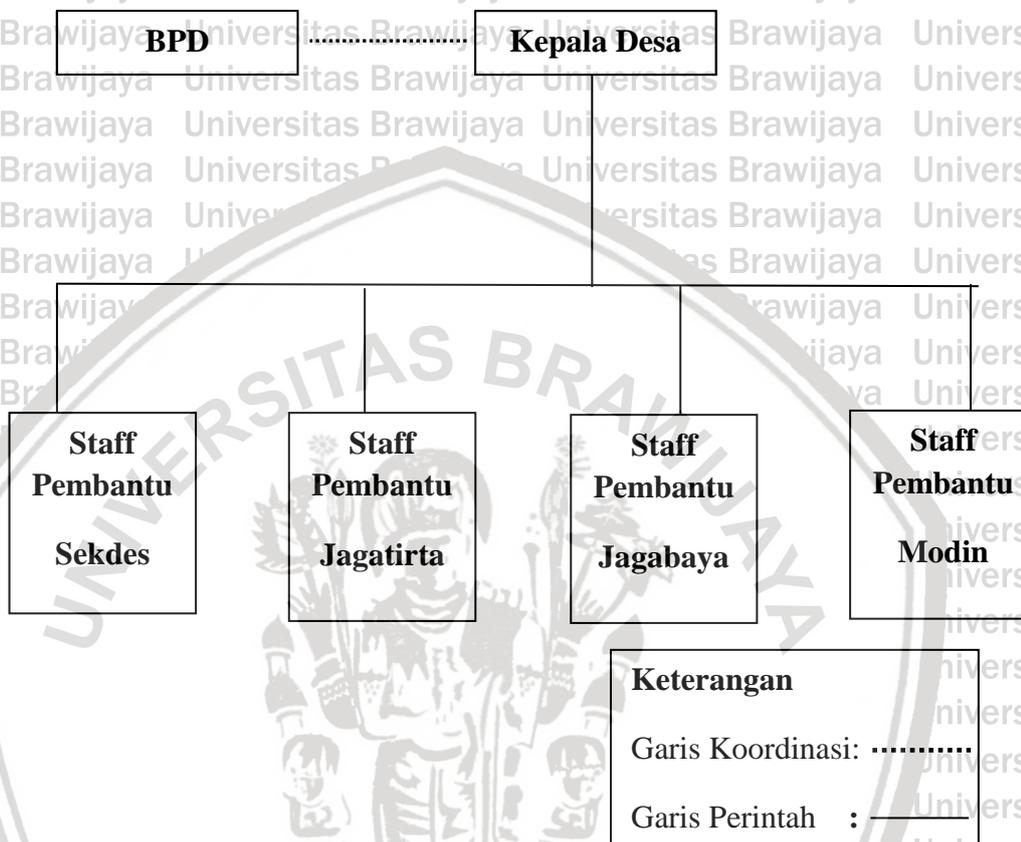
2.3.4 Organisasi Sosial

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, sehingga memang sudah kodratnya manusia selalu hidup bermasyarakat, berkelompok, dan berorganisasi. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di dalam masyarakat Desa Pakuncen terdapat beberapa organisasi baik dalam segi keagamaan atau sosial seperti organisasi kemuslimatan seperti pengajian NU, pendidikan sekolah formal seperti OSIS dan non formal seperti mengaji di masjid, dan pemberdayaan masyarakat seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna (KARTAR).



2.4 Struktur Pemerintahan Desa

Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Desa



Sumber: Buku Administrasi Desa Pakuncen Tahun 2015.

Desa Pakuncen memiliki keunikan dari segi struktur pemerintahan desa seperti bagan di atas. Terlihat bahwa Desa Pakuncen tidak memiliki struktur pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan yakni tidak dilengkapi oleh perangkat desa seperti sekretaris desa dan perangkat lainnya melainkan hanya staff pembantu. Keunikan tersebut sampai sekarang ini masih diakui dan diterima oleh jajaran pemerintahan seperti Kecamatan Patianrowo dan Kabupaten Nganjuk.

Alasannya disebabkan jumlah masyarakat yang sangat sedikit, sehingga tidak membutuhkan perangkat desa lainnya cukup dibantu dengan staff. Meskipun tidak

memiliki perangkat desa sebagaimana mestinya bukan berarti semua tugas desa dikerjakan oleh kepala desa saja, tetapi dibantu oleh staff pembantu yang berjumlah sebanyak empat orang. Staff pembantu desa berasal dari masyarakat setempat. Mereka mendapat gaji dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Desa Pakuncen. Keunikan tersebut tidak dijadikan sebagai masalah oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sampai saat ini pihak pemerintah setempat tidak meminta atau mengharuskan untuk melengkapi perangkat desa (wawancara dengan Ibu Agustin tanggal 20 Maret 2016).

2.5 Sejarah Terbentuknya Kadipaten Posono dan Kepemimpinannya

Sekitar tahun 1700 Masehi datang serombongan pasukan dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh RMT. Poerwodiningrat. Ia adalah orang utusan dari Mataram yang diberi tugas oleh Kanjeng Sultan Pakubuwono I untuk mendirikan kota kepatihan atau kadipaten yang lokasinya berada di pinggiran sungai Brantas. Mereka menganggap lokasi dari Desa Kauman sangat strategis dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Kanjeng Sultan Pakubuwono I kepadanya. Selanjutnya RMT. Poerwodiningrat dan pasukannya berunding untuk mengadakan perkenalan atau pendekatan dan perundingan dengan Kyai Nurjalipah. Kyai Nurjalipah adalah orang yang membatat alas Desa Kauman tersebut. Usaha tersebut membuahkan hasil yang baik yakni usahanya berhasil dan tercapai untuk mengadakan perundingan dengan Kyai Nurjalipah. Sampai akhirnya mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak dan didukung juga oleh para santri Kyai Nurjalipah. Dengan demikian Desa Kauman menjadi kadipaten Posono dengan 3 (tiga) periode pemimpin sebagai berikut:

1. Adipati I : Raden Mas Tumenggung Poerwodiningrat.
2. Adipati II : Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat.
3. Adipati III : Raden Tumenggung Wiryonegoro.

Daerah kekuasaan Kadipaten Posono meliputi Desa Kauman, Desa Sentanan, Desa Patianrowo, dan sekitarnya. Pusat Kadipaten terletak di Desa Kauman. Setelah terbentuknya kadipaten tersebut, Kyai Nurjalipah diangkat menjadi Talangpati atau Senopati sekaligus merangkap sebagai Demang. Demang menurut KBBI adalah kepala distrik pada zaman Pemerintahan Hindia-Belanda atau kepala daerah. Beberapa tahun kemudian setelah berlangsungnya kepemimpinan pertama oleh Adipati I, permaisuri beliau (RA. Poerwodiningrat) meninggal dunia dan sejak saat itu timbul masalah. Masalah yang timbul pada saat itu adalah dimana jenazah permaisuri akan dimakamkan, karena beliau masih termasuk kerabat dekat dari Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat akhirnya atas persetujuan dari Kanjeng Sultan Pakubuwono I jenazahnya dimakamkan di tanah milik Kyai Nurjalipah. Letak makam permaisuri berada di belakang Masjid Baitur Rohman (Wawancara dengan Juru Kunci yang kesepuluh tanggal 21 Maret 2016).

Selang beberapa bulan RMT. Poerwodiningrat dipanggil oleh Kanjeng Sultan Pakubuwono I untuk kembali ke Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Ia diangkat menjadi seorang Tumenggung di Magetan hingga Ia meninggal dunia di sana, sehingga dimakamkan di Desa Pacalan Kabupaten Magetan. Selanjutnya kepemimpinan Kadipaten Posono diteruskan oleh RMT. Sosrodiningrat yang masih keturunan dari keluarga Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Ia menjadi

Adipati ke II di Kadipaten Posono. Ia memimpin selama berapa tahun lamanya tidak ada yang tahu pastinya, tetapi setelah istrinya meninggal dunia dan dimakamkan berdampingan dengan makam RA. Poerwodiningrat dalam satu cungkup. Beberapa bulan kemudian RMT. Sosrodiningrat dipanggil untuk kembali ke Mataram Yogyakarta Hadiningrat.

Setelah Ia kembali ke sana, selanjutnya sempat terjadi kekosongan kepemimpinan di Kadipaten Posono. Kemudian setelah terjadi kekosongan kepemimpinan, Ibu Kota Kadipaten Posono yang awalnya berada di Desa Kauman dipindahkan ke selatan yang sekarang ini menjadi Kertosono. Pada saat itu yang menjadi Adipati ke III adalah Raden Tumenggung Wiryonegoro. Ia menjadi Adipati terakhir di Kadipaten Posono. Berdasarkan bukti-bukti seperti petilasan dan dokumentasi dari juru kunci makam menyebutkan RT Wiryonegoro meninggal dunia pada tahun 1722 M. Jenazahnya dimakamkan di Dusun Besuk Desa Patianrowo dekat dengan pabrik gula Lestari.

Lama kepemimpinan yang dijabat oleh Adipati-adipati di atas yang pertama oleh RMT. Poerwodiningrat, kedua RMT. Sosrodiningrat, terakhir RT. Wiryonegoro. Kepemimpinan atas Adipati tersebut dapat ditafsirkan berlangsung selama kurang lebih 1700 M sampai dengan 1722 M. atau sekitar 22 tahun.

Setelah kejadian tersebut Kadipaten Posono berubah nama menjadi Kertosono dan bergabung dengan Kabupaten Berbek serta Kabupaten Nganjuk. Mengingat kabupaten-kabupaten tersebut masih berada dalam satu wilayah dengan daerah Nganjuk, maka dijadikan satu dengan Kabupaten Nganjuk yang ditandai dengan

penandatanganan perjanjian Spreh pada tanggal 4 Juli 1930 yang disaksikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

2.6 Terbentuknya Tanah Perdikan Pakuncen

Berawal dari tanah milik Kyai Nurjalipah yang dijadikan sebagai tempat pemakaman dari permaisuri Adipati Kadipaten Posono yakni RA. Poerwodiningrat, RA. Sosrodiningrat, dan kerabat priyai-priyai agung Mataram.

Atas kesepakatan yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram dengan Kyai Nurjalipah terkait tanah yang dijadikan sebagai pemakaman tersebut ada perjanjian yang dibuat antara mereka. Perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut sebagai berikut:

1. Tanah Kyai Nurjalipah yang memiliki luas 10 Ha pada saat itu yang sebagian besar dipergunakan untuk tempat pemakaman keluarga Kanjeng Sultan Pakubuwono I dibebaskan dari pembayaran pajak, karena ada rasa terimakasih atau balas budi terhadap orang yang telah membat alas dan membangun sebuah tempat pemukiman yang diberi nama sebagai Desa Perdikan.
2. Kyai Nurjalipah diangkat menjadi juru kunci yang pertama untuk menjaga, merawat, dan mengawasi makam keluarga Kanjeng Sultan Pakubuwono 1 dan priyai-priyai agung Mataram beserta programnya. Program yang harus dilaksanakan yakni mengadakan pengajian setiap jumat legi. Pengajian tersebut bertempat di makam keluarga Mataram guna mendoakan arwah

yang telah tiada dan harus dilaksanakan secara rutin serta turun – temurun oleh keturunan Kyai Nurjalipah.

3. Desa Kauman diganti dengan nama Desa Pakuncen, disebabkan adanya penyerahan kunci cungkup atau pintu makam keluarga agung Mataram menjadi tanggung jawab Kyai Nurjalipah dan keturunannya yang berjenis kelamin laki – laki.

Demi menjalankan tanggung jawab tersebut, Kyai Nurjalipah membuat wasiat yang diperuntukkan bagi keturunannya yang isinya sebagai berikut:

“Mengingat perkembangan anak cucu serta keluarga, maka Pakuncen hanya boleh dihuni keluarga sendiri dan bahkan keluarga sendiripun apabila tidak mematuhi yang telah ada, diusir dari bumi Pakuncen”.

Sumber: Dokumentasi yang dimiliki oleh juru kunci Desa Pakuncen kesembilan

Isi perjanjian tersebut sampai saat ini masih diteruskan dari generasi ke generasi dari Kyai Nurjalipah. Program yang diadakan oleh juru kunci makam dari dulu hingga sekarang masih dilaksanakan, sehingga menjadi sebuah kebudayaan dan adat masyarakat Desa Pakuncen. Makam tersebut dibagi menjadi dua pintu gerbang:

1. Gerbang Pertama : Makam Keluarga Kyai Nurjalipah
2. Gerbang Kedua : Makam Keluarga Agung Mataram

Berdasarkan keterangan terkait pengangkatan Kyai Nurjalipah menjadi seorang Senopati dan Demang juga diangkat menjadi juru kunci makam, sehingga keturunan dari Kyai Nurjalipah yang menjadi juru kunci juga merangkap sebagai kepala desa. Hal tersebut berlangsung sampai keturunannya yang ketujuh. Setelah

adanya perjanjian tersebut Desa Pakuncen dijadikan sebuah desa dengan dasar tanah perdikan. Tanah Perdikan menurut UUD Negara 1945 yakni suatu keadaan yang menyatakan daerah istimewa dengan dibebaskannya pembayaran pajak tanah. Pembebasan tersebut dikarenakan adanya jasa atas raja atau orang yang babat alas seperti halnya yang terjadi di Desa Pakuncen oleh Kyai Nurjalipah yang menyetujui adanya kerja sama dengan pihak Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Status atas tanah perdikan tersebut berlangsung hingga puluhan tahun dan dicabut statusnya sejak kemerdekaan Negara Indonesia pada tahun 1945 status tanah perdikan tersebut sudah dihapus.

Penghapusan atas tanah perdikan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi penghapusan tersebut telah diatur dalam UUD 1945. Tanah perdikan dihapus karena tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Isi pada ayat tersebut di atas menyatakan bahwa penghapusan status tanah perdikan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat Indonesia semakin baik dan demi kesejahteraan rakyat. Setelah adanya peraturan tentang penghapusan status tanah perdikan tersebut, setiap masyarakat Desa Pakuncen yang memiliki sebidang tanah dan bangunan diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN

Bab III ini penulis akan menguraikan mengenai data yang ditemukan di lapangan terkait rumusan masalah pertama yakni tentang persepsi masyarakat terhadap kepala desa perempuan. Sebelumnya penulis akan menjelaskan adanya pergeseran kekuasaan dan peran juru kunci dalam mengatur desa, setelah dilaksanakannya PILKADES di Desa Pakuncen tahun 1992. Fokus yang akan dibahas dalam bab ini adalah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pakuncen yang akan dianalisis menggunakan teori gender.

3.1 Kepemimpinan Kultural Desa Pakuncen

Desa Pakuncen dulunya memiliki sistem kepemimpinan secara *lineages*.

Berikut pengertian mengenai *lineages*:

“A lineage is a unilineal descent (matrilineal or patrilineal) association of limited genealogical scope within which everyone is able to trace their relationship to everyone else” (Kurtz, 2001: 82).

Pengertian *Lineages* kurang lebih sebagai berikut sebuah garis keturunan yang ditarik atas dasar matrilineal atau patrilineal dari proses interaksi dalam satu lingkup silsilah yang bisa digunakan untuk melacak hubungan dengan orang lain.

Konsep *lineages* oleh Donald V. Kurtz terdapat pada silsilah keturunan Kyai Nurjalipah yang bisa dilacak dari orang lain yang dalam konteks penelitian

ini adalah masyarakat Desa Pakuncen, karena orang asli desa setempat mengerti nama-nama dari silsilah tersebut. Keturunannya ditarik berdasarkan patrilineal atau garis keturunan bapak atau seorang laki-laki. Kyai Nurjalipah merupakan tokoh utama yang melakukan babat alas Desa Pakuncen sekaligus orang yang menjadi kepala desa di Desa Pakuncen kali pertama. Desa Pakuncen memiliki seorang kepala desa yang sekaligus merangkap sebagai juru kunci hingga beberapa keturunan. Juru kunci dengan status jabatan tersebut terakhir dijabat oleh juru kunci ketujuh. Status juru kunci selanjutnya berubah menjadi juru kunci pemerintahan dan tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, hanya sebagai juru kunci makam. Perubahan status atas juru kunci tersebut dipengaruhi adanya peraturan pemerintah dalam UUD RI No. 5 Tahun 1979 pasal 5 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan tersebut tidak langsung diterapkan di Desa Pakuncen, tetapi dalam kurun waktu yang cukup lama baru diterapkan. Menurut penuturan juru kunci kesepuluh hal tersebut dikarenakan belum adanya kesepakatan dari masyarakat setempat untuk melakukan demokrasi sesuai dengan isi peraturan. Perubahan suatu kebudayaan pada masyarakat bukan persoalan yang mudah. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2009: 144) adalah keseluruhan gagasan dan hasil budi serta karya manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai identitas. Identitas yang terdapat di desa setempat menurut masyarakat yakni melanggengkan kebudayaan kerajaan, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perubahan kebudayaan pada masyarakat Desa Pakuncen yakni

berubahnya cara pemilihan kepala desa yang awalnya secara *lineages* menjadi demokrasi.

Mengubah pola pikir suatu masyarakat yang sudah tertanam sejak puluhan tahun lamanya memang pekerjaan yang tidak mudah, perlu kurun waktu yang cukup lama untuk merubahnya. Cara yang dilakukan oleh pihak desa yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat terkait peraturan baru yang berisi kepala desa mulai tahun 1979 dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang bersangkutan misalnya tokoh yang dianggap memiliki peran penting di desa yakni juru kunci. Ia memiliki peran yang sangat kuat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat karena ia adalah orang yang memiliki kekuasaan tunggal di desa pada zamannya.

Peraturan UUD tentang Pemerintahan Desa baru diterapkan di masyarakat Pakuncen pada tahun 1992. Pada tahun tersebut pertama kalinya dilaksanakan PILKADES di Desa Pakuncen yang dilaksanakan hingga sekarang. Sebelumnya sempat terjadi kekosongan pemerintahan selama dua tahun setelah meninggalnya juru kunci yang ketujuh tahun 1990. Kekosongan atas pemerintahan tersebut tidak diketahui secara pasti oleh juru kunci selanjutnya beserta masyarakat setempat. Selama terjadi kekosongan pemerintahan tersebut apabila ada masyarakat Pakuncen yang ingin mengurus surat menyurat, maka pihak yang bersangkutan bisa langsung datang ke kantor Kecamatan Patianrowo. Lokasi kantornya berada di Desa Rowomarto. Di sana mereka akan dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka oleh perangkat kantor Kecamatan Patianrowo. Kekosongan tersebut

berakhir setelah adanya PILKADES, karena mengingat tidak akan berjalan dengan baik sebuah sistem pemerintahan desa apabila tidak ada orang yang memimpin. Sehingga setelah ada kesepakatan dari masyarakat setempat untuk melakukan PILKADES sesuai dengan peraturan Pemerintahan Desa barulah dipilih seseorang untuk menjadi kepala desa dan memimpin desa.

Tabel 3.1 Susunan Silsilah Juru Kunci Makam Pakuncen

SUSUNAN SILSILAH JURU KUNCI MAKAM PAKUNCEN

No.	Nama	Masa Kepemimpinan	Jabatan
1	Kyai Nurjalipah	Th. 1710 - 1760 M.	Lurah dan Juru Kunci Peratam
2	Marsongko	Th. 1760 - 1795 M.	Lurah dan Juru Kunci Perdikan
3	Kertosari	Th. 1795 - 1838 M.	Lurah dan Juru Kunci Perdikan
4	Keromosari	Th. 1838 - 1873 M.	Lurah dan Juru Kunci Perdikan
5	Murtoyo	Th. 1873 - 1908 M.	Lurah dan Juru Kunci Perdikan
6	Keromorejo	Th. 1908 - 1938 M.	Lurah dan Juru Kunci Perdikan
7	H. Nursalam	Th. 1938 - 1973 M.	Lurah dan Juru Kunci Perdikan
8	Mashuri	Th. 1973 - 1990 M.	Lurah dan Juru Kunci Pemerintahan
9	Choiri	Th. 1990 - 2000 M.	Juru Kunci Pemerintahan
10	A. Akbar Sunandir	Th. 2000 – sekarang	Juru Kunci Pemerintahan

Sumber: Wawancara dengan Juru Kunci ke-10 Desa Pakuncen

3.2 Pergeseran Kekuasaan dan Peran Juru Kunci Desa Pakuncen

Tahun 1651 di Desa Pakuncen ada dua orang berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai pengetahuan tentang agama Islam dengan sangat baik. Keduanya melakukan perjalanan di daerah Kertosono yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Keduanya masih memiliki hubungan saudara yakni kakak beradik, mereka bernama Kyai Nurjalipah dan Kyai Murtolo. Mereka merupakan murid atau santri dari Kanjeng Sunan Giri. Kyai Nurjalipah memiliki ide untuk membuka lahan atau disebut dengan babat alas yang dibantu oleh para santri dan adiknya. Selanjutnya lahan tersebut dipergunakan sebagai tempat pemukiman yang kurang lebih seluas 10 Ha (sebelum adanya pelebaran wilayah, sekarang menjadi 11,7 Ha). Mereka memiliki santri dengan jumlah yang cukup banyak yang datang dari berbagai daerah khususnya daerah karisidenan Kertosono, sehingga memiliki cukup personil untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan olehnya tersebut.

Mereka dengan santrinya mendirikan sebuah masjid yang bertujuan untuk menunjang berlangsungnya penyebaran dan pengajaran tentang agama Islam seperti halnya belajar mengaji dan berdakwah. Masjid yang didirikan pada waktu itu dulunya diberi nama Masjid Kauman yang beberapa tahun silam diganti nama menjadi Masjid Baitur Rohman. Pergantian nama tersebut tidak ketahui secara pasti kapan terjadinya. Masjid tersebut dulunya dibangun dari bahan dasar kayu, atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu. Bahan-bahan dasar pembuatan masjid didapatkan dari pepohonan setempat. Sekitar tahun 1980 masjid tersebut direnovasi, sehingga bangunan yang awalnya terbuat dari kayu dirubah menjadi

bangunan yang terbuat dari batu dan semen. Murid-muridnya yang belajar tentang agama Islam, datang dari berbagai daerah, dimana pada waktu antar desa itu jaraknya masih berjauhan karena masih berupa hutan. Semakin hari muridnya bertambah banyak. Banyaknya orang yang ingin berguru pada mereka karena konon katanya mereka memiliki kekuatan atau ilmu kesaktian yang tidak bisa ditangkap dengan logika. Kekuatan yang mereka miliki yakni dengan selangkah kakinya, mereka sudah bisa sampai ke desa yang berada di seberang sungai brantas untuk menyebarkan agama Islam. Pemukiman yang didirikan dengan bantuan para santrinya tersebut diberi nama Desa Kauman. Alasan pemberian nama Desa Kauman tersebut karena masyarakatnya semua beragama Islam. Selain itu juga ada harapan agar kehidupan masyarakatnya damai, aman, dan sejahtera atau *gemah ripah lohjinawi toto tentrem titi raharjo* (Wawancara dengan Pak Su tanggal 21 Maret 2016).

Desa Kauman tersebut berubah nama menjadi Desa Pakuncen, Kota Lama Kertosono. Perubahan nama Desa Kauman menjadi Desa Pakuncen karena ada kejadian bersejarah, sehingga berdampak pada pergantian nama desa. Berikut kejadian bersejarah yang terjadi di sana, sebelumnya telah dijelaskan bahwa desa ini menjadi tempat pemakaman kerabat dari Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat yakni RA. Poerwodiningrat, RA. Sosrodiningrat, dan kerabat priyai-priyai agung Mataram. Tanah yang digunakan sebagai tempat pemakaman tersebut berada di bagian tengah-tengah Desa Pakuncen. Tepatnya berada di belakang masjid Baitur Rohman. Tempat pemakaman tersebut dibangun menjadi sebuah bangunan yang bernuansakan bangunan Keraton Mataram Yogyakarta

Hadiningrat. Terlihat dari arsitek dan ukiran yang digunakan pada bangunan makam. Pemakaman tersebut dibangun menjadi 3 bagian:

1. Cungkup utama (Pintu Kedua), untuk keluarga Mataram diantaranya R.A Purwodiningrat, R.A Sosrodiningrat, R.A Kusumaningrat, dan R.A Kartodiningrat
2. Pintu pertama untuk keluarga juru kunci diantaranya Kyai Nurjalipah, Marsongko, Kertosari, Keromosari, Murtoyo, Keromorejo, H. Nursalam, Mashuri, dan Choiri
3. Makam umum untuk masyarakat Desa Pakuncen dan sebagian masyarakat Desa Rowomarto, karena sebelumnya ada perjanjian dengan pemimpin desa setempat.



Gambar 3.1 Cungkup Pertama

Sumber: Dokumentasi Penelitian



Gambar 3.2 Cungkup Utama

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Adanya pembagian cungkup yang disertai dengan kunci pintu, khususnya pintu kedua atau cungkup utama yang berisi makam dari keluarga Mataram.

Kunci pintu tersebut awalnya diserahkan kepada Kyai Nurjalipah yang selanjutnya diserahkan kepada keturunannya yang berjenis kelamin laki-laki.

Pemegang kunci cungkup tersebut berstatus sebagai juru kunci yang memiliki kewajiban melaksanakan program-program seperti dalam perjanjian yang telah disepakati antara pihak kesultanan Mataram dengan Kyai Nurjalipah. Penyerahan kunci cungkup tersebut dikenal dengan istilah Pakuncen yang berarti "Pa" adalah pemberian "Kuncen" adalah kunci.

Dapat diketahui melalui tabel no 4 di atas bahwa juru kunci pada periode pertama sampai dengan ketujuh, mereka memiliki status sebagai penguasa tunggal

di desa. Kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh Kanjeng Sultan Pakubuwono

I untuk mengatur Desa Pakuncen. Kekuasaan yang mereka miliki pada saat itu diantaranya pengambil segala keputusan mulai dari memerintah masyarakat setempat dan memberi keputusan atas semua kegiatan yang akan diadakan di desa.

Disamping itu juru kunci memiliki peran yang sangat penting dalam hal keagamaan misalnya mengadakan ritual kirim doa, memimpin doa tamu yang hendak berziarah ke makam khususnya dalam cungkup pertama dan kedua, merawat makam, menikahkan masyarakat atau disebut sebagai penghulu.

Kekuasaan tunggal yang dimiliki oleh juru kunci desa hanya berlaku sampai keturunannya yang ketujuh, karena setelah itu juru kunci tidak lagi memiliki kekuasaan penuh atas desa. Hal tersebut dikarenakan akan dilaksanakannya PILKADES, sehingga kekuasaan yang dimilikinya akan digantikan dan dipegang oleh kepala desa. Meski begitu, juru kunci tetap dijabat oleh keturunan langsung dari Kyai Nurjalipah. Tertera dengan jelas dalam isi perjanjian yang dibuat oleh Kyai Nurjalipah dengan pihak Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat terkait tugas yang harus dilaksanakan juru kunci dan dilakukan secara turun temurun. Setelah meninggalnya juru kunci ketujuh yang merupakan juru kunci terakhir pemegang kekuasaan sebagai lurah atau kepala desa, digantikan oleh adiknya bernama Pak Choiri. Pada saat juru kunci dijabat oleh Pak Choiri, statusnya diakui sebagai juru kunci pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan terdaftar sebagai Abdi Dalem Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Setelah Ia meninggal dunia, selanjutnya digantikan oleh Pak Sunandir. Juru kunci kesepuluh ini selain memiliki status seperti yang disandang

oleh Pak Choiri juga diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2007. Ia diangkat sebagai PNS oleh pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Kepala desa selanjutnya dijabat langsung dari masyarakat Desa Pakuncen yang bukan merupakan keturunan langsung dari Kyai Nurjalipah.

1. Dijabat oleh Pak Munandar (1992 - 2001)
2. Dijabat oleh Pak Parna (2001 - 2009)
3. Dijabat oleh Bu Renny Roslina (2009 - 2014)
4. Dijabat oleh Bu Renny Roslina (2014 - sekarang)

3.3 Kecakapan Kepala Desa dalam Menjalankan Tugas

Kekuasaan selanjutnya dipegang oleh orang yang terpilih menjadi kepala desa sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam UUD tentang Pemerintahan Desa. Kepala desa merupakan kedudukan yang sangat tinggi di desa, sehingga siapapun yang menjadi kepala desa maka Ia memiliki kekuasaan penuh atas desa. Kekuasaan yang dijalankan tidak boleh senaknya sendiri atau atas dasar kepentingan pribadi, tetapi harus berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Disamping itu juga bertujuan untuk membangun dan memajukan desa agar tidak menjadi desa tertinggal. Sangat penting usaha membangun desa dilakukan, karena desa merupakan pondasi suatu negara dalam masalah proses pembangunan sebab unit terkecil dari negara adalah desa. Tidak hanya itu saja pembangunan desa juga berperan dalam terjadinya perubahan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Di dalam sebuah desa terdapat aspek-aspek seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat yang saling mempengaruhi, seperti halnya pembangunan

desa. Pembangunan desa juga terjadi di Desa Pakuncen, pembangunan desa sebelum tahun 2009 dilakukan seorang laki-laki. Laki-laki yang dimaksud adalah masyarakat setempat yang menjadi pemimpin atau kepala desa, terlepas dari keturunan Kyai Nurjalipah atau setelah dilaksanakannya PILKADES. Perempuan dari desa setempat belum pernah ada yang melakukan pembangunan desa, khususnya perempuan yang menduduki posisi politik di desa. Perempuan selalu dipandang rendah derajatnya oleh laki-laki, sehingga hak-hak yang seharusnya perempuan miliki jarang bahkan tidak pernah terpenuhi. Hak-hak yang melekat dalam diri seorang perempuan diantaranya mendapatkan rasa nyaman, tidak mendapat siksaan dari pihak manapun, tidak didiskriminasi khususnya dalam penelitian ini adalah di bidang politik. Hal tersebut dapat menghambat kemajuan para perempuan. Pandangan rendah seorang perempuan sampai sekarang tetap saja terdapat dalam masyarakat meskipun tidak serendah pada zaman dulu.

Perkembangan dan kemajuan dari berbagai segi-segi kehidupan membawa dampak perubahan dalam nilai dan norma masyarakat. Masalah demi masalahpun muncul dan menghambat kaum perempuan terkait posisinya dalam politik yang termarginalkan. Banyak perilaku yang mengarah pada ketidakadilan perempuan dalam hal ini. Banyaknya opini yang lahir dari masyarakat Jawa tentang perempuan yang berusaha memojokkannya. Misalnya dunia perempuan adalah tiga M maksudnya menghias diri, memasak, dan melahirkan atau yang sering disebut dengan (*macak, masak, manak*) dan ungkapan jika ke neraka duluan, tetapi ke surganya hanya ikut (*suargo numut, neroko katut*) (Ismawati. 2005: 1-2).

Opini tersebut mewakili kewajiban seorang perempuan yang diharapkan oleh

orang Jawa khususnya para laki-laki adalah perempuan tugasnya hanya berada pada ranah domestik, bukan berada pada ranah publik seperti halnya politik.

Banyak gerakan feminisme yang menyuarakan hak-hak perempuan yang tujuannya untuk meningkatkan kedudukan dan derajat kaum perempuan supaya sejajar dengan kaum laki-laki, terutama politik, agama, dan sosial (Ibid. 2005: 30).

Berkat perjuangan dari perempuan yang sadar akan ketertindasan tersebut, maka sekarang banyak perempuan yang menunjukkan bahwa dirinya mampu menyamai derajat kaum laki-laki dalam politik. Banyak perempuan yang mulai menempati posisi politik mulai tingkat negara hingga lokal seperti Ibu R yang menduduki posisi politik sebagai kepala desa.

Ibu R adalah seorang perempuan yang memiliki status ganda yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan kepala desa di Desa Pakuncen. Ibu R adalah anak keempat dari lima bersaudara. Ibu R menikah tahun 1997 dengan seorang laki-laki berasal dari desa lain yang bekerja di sebuah pabrik gula yakni PG. Lestari. Mereka dikaruniai tiga orang anak, yang pertama yakni anak perempuan yang lahir pada tahun 1998, kedua, laki-laki lahir tahun 2003, dan yang terakhir adalah anak perempuan lahir pada akhir tahun 2012. Ibu R terlahir dari keluarga yang sederhana. Sehari-sehari ayah dan ibunya bekerja sebagai buruh tani di desa tetangga seperti Desa Rowomarto, Desa Patianrowo, dan Desa Ngrombot. Hal tersebut dikarenakan Desa Pakuncen hanya memiliki luas daerah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan desa tetangga. Seperti yang dijelaskan dalam bab II sub bab keadaan geografis menyajikan data sebagai berikut 6 Ha dari luas Desa Pakuncen sebesar 11,7 Ha digunakan untuk lahan

persawahan. Gaji yang didapatkan dari pekerjaan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sehingga sejak kecil Ibu R terbiasa hidup sederhana.

Sebelum menjabat sebagai kepala desa, Ibu R mengerjakan kewajibannya sebagaimana mestinya seorang ibu rumah tangga. Setiap hari Ia mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mengurus suami dan anak-anaknya, memasak dan sebagainya. Meskipun Ia harus mengurus pekerjaan rumah, tetapi tidak lupa tetap menjaga hubungan sosial yang baik dengan masyarakat setempat. Terbukti dengan sikap solidaritasnya terhadap tetangga yang ada di sekitarnya, misalnya dengan memberi sapaan kepada orang yang ditemuinya dengan ramah seperti melontarkan kata *monggo!*, *pak!*, *bu!*, *mbak!* dan sebagainya. Terbukti di lapangan ketika Ibu R bertemu atau bersimpangan dengan masyarakat setempat, Ia menyapa dan begitu sebaliknya dilakukan oleh masyarakat kepada Ibu R.

Sejak masih muda, tepatnya sebelum menikah Ia sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh desa setempat misalnya organisasi pemuda yang dikenal dengan istilah Karang Taruna. Karang Taruna di Desa Pakuncen mayoritas diikuti oleh anak-anak atau remaja kisaran usia 13 tahun sampai dengan 24 tahun. Kegiatan ini diadakan guna memfasilitasi dan memberikan pembinaan serta pengembangan generasi muda agar sadar atas tanggung jawab sosial yang dipegangnya yakni melaksanakan kegiatan atas dasar dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini berkaca dari pembukaan UUD 1945 yang berisi “.....dari

rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” yang diterapkan dalam kegiatan Karang Taruna Desa Pakuncen yakni “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat”. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang diadakan seperti kegiatan rutin tahunan yakni agustusan selalu meminta partisipasi dan bantuan dari masyarakat agar berjalan kegiatan tersebut (wawancara dengan Mas A tanggal 01 April 2016). Adanya organisasi karang taruna ini juga membantu masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya dalam menyumbang ide terhadap suatu kegiatan misalnya memberi ide lomba apa yang bisa diadakan agar berbeda dari tahun sebelumnya. Kebaktian Ibu R dan para anggota organisasi sejak sebelum Ia menjadi ketua hingga sekarang membuktikan bahwa generasi muda dapat membentuk kepanitiaan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan desa seperti acara kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu saja, keaktifan Ibu R dalam berorganisasi di desa semakin terlihat hingga Ia menikah, seperti halnya mengikuti organisasi ibu-ibu PKK, pengajian ibu-ibu, dan arisan desa dengan iuran mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Kegiatan tersebut terus dijalannya sebelum Ia menjadi seorang kepala desa.

Keaktifan Ibu R tidak sebatas menjadi anggota saja dalam organisasi yang diikutinya, tetapi Ia pernah menduduki posisi penting di dalamnya untuk menentukan tujuan yang mengarah pada keberhasilan program yang diadakan. Posisi penting yang pernah Ibu R duduki yakni menjadi ketua karang taruna. Menjadi seorang ketua bukan pekerjaan yang mudah, karena harus berusaha dan mampu menggerakkan anggotanya demi kesuksesan acara yang menjadi program dalam karang taruna yang pernah Ia ketuai misalnya, acara kemerdekaan Republik

Indonesia atau Agustusan. Selain itu Ia juga pernah menjadi sekretaris pada organisasi ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Berikut pernyataan yang dipaparkan oleh Ibu R “...saya pernah menjadi ketua karang taruna dan sekretaris PKK”. Ketika menjadi sekretaris Ia harus mampu mencatat dan mengambil kesimpulan dari hasil musyawarah keanggotaan. Salah satu bukti keberhasilan yang diraih oleh Ibu R adalah berhasil membuat sukses acara Agustusan seperti yang Ibu Komariyah paparkan:

“Bu Reny itu sewaktu jadi ketua Karang Taruna orangnya tegas, mengadakan lomba Agustusan. Yaa lombanya bermacam-macam gitu. Lomba balap karung, makan krupuk. Orang sini iya seperti itu mbak kegiatannya pokoknya meriah sewaktu ketuanya Ibu R. Banyak yang ikut anak muda-muda, ibu-ibu juga ada tapi sebagian mbak” (Wawancara dengan Ibu Komariyah, tanggal 25 Maret 2016).

Kinerja yang dilakukan oleh Ibu R dinilai bagus khususnya oleh masyarakat setempat. Senada dengan yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang menyatakan pendapatnya mengenai sosok Ibu R baik dalam mengadakan kegiatan ketika belum menjadi kepala desa. Mayoritas mereka menyatakan bahwa Ibu R adalah seorang perempuan yang tegas, profesional, ramah, tidak membeda-bedakan golongan (miskin atau kaya), dan memiliki sopan santun yang baik dengan masyarakat.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh kepala desa perempuan untuk memberikan dukungan atau stimulus kepada masyarakatnya dalam hal pengembangan usaha. Usaha mulai dari tingkat *mikro*, menengah, dan *makro*, seperti memberi fasilitas industri rumah tangga yang beroperasi dalam menghasilkan kerajinan seperti halnya sablon baju yang masih dalam tahap

penyediaan dan hasil olahan makanan seperti kripik pisang, rempeyek, dan jajanan lainnya. Kepala desa khususnya ketika periode kepemimpinan Ibu R melakukan kerja sama dengan pihak ponpes. Kerja sama yang diadakan yakni menyediakan jasa, masyarakat sekitar tempat praktek penyembuhan Al-Qomar. Penyediaan jasa tersebut diadakan, karena mengingat banyaknya pengunjung yang datang dari luar daerah bahkan dari luar kota; Surabaya, provinsi; Yogyakarta, dan pulau; Kalimantan. Hal tersebut di atas sangat berpotensi dalam memberdayakan masyarakat sekitar yang memiliki rumah untuk dijadikan *home stay*.

Tidak akan berjalan apabila pembangunan desa tanpa diimbangi dengan adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana seperti bangunan atau gedung dan jalan. Desa telah menyediakan rumah industri penyablonan baju yang akan dijadikan sebagai oleh-oleh khas desa setempat, tetapi masih dalam tahap penyediaan belum sampai pada pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan mesin penyablonan yang akan digunakan masih pada tahap pemesanan. Selanjutnya ketua dari produksi penyablonan beserta anggotanya sudah dipilih oleh Ibu R yakni diambil dari organisasi karang taruna. Penyediaan produksi sablon nantinya akan diterapkan sistem bagi hasil, karena bagaimanapun yang memfasilitasi mereka adalah desa. Menurut penuturan Ibu R, sebagian dari hasil penjualan sablon nantinya akan masuk pada uang khas desa, selain digunakan sebagai biaya produksi dan uang khas dari organisasi Karang Taruna. Hal tersebut berlaku juga pada masyarakat yang menitipkan hasil olahannya ke rumah usaha. Pemberian fasilitas usaha tersebut merupakan program kerja baru yang diterapkan oleh Ibu R pada periode kedua ini.



Gambar 3.3 Rumah Usaha

Sumber: Dokumentasi penelitian

Pembangunan desa juga harus berjalan secara beriringan dengan sektor lain yang bisa mendukung percepatan pembangunan seperti peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan jaringan komunikasi. Dapat dilihat bahwa Desa Pakuncen sudah lengkap akan sarana pendidikannya meskipun masih berstatus swasta atau disetarakan. Hal tersebut dikarenakan semua fasilitas pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA didirikan oleh sebuah yayasan yakni yayasan Al-Qomar. Semua yayasan pendidikan yang ada berlatarbelakang agama Islam mengingat pendirinya adalah sebuah yayasan agama Islam. Dari segi kesehatan meski belum ada puskesmas, tetapi sudah disediakan ruang untuk pelayanan kesehatan yang baru diadakan sebulan sekali. Tempat yang digunakan yakni bertempat di aula dekat dengan kantor balai desa diberi nama poskesdes, sehingga masyarakat sekitar bisa mengecekkan kesehatannya sebulan sekali dengan membayar uang sejumlah lima ribu rupiah. Uang tersebut dimasukkan ke uang khas desa, karena bidan yang bertugas merupakan bantuan dari pihak kecamatan sebagai salah satu program kerjanya (wawancara dengan Ibu R tanggal

27 Maret 2016). Sedangkan dari segi komunikasi yakni desa memfasilitasi layanan internet gratis (*free wifi*) yang bertempat di kantor kepala desa. Tujuan diadakannya layanan tersebut untuk memudahkan staff pembantu dalam mengakses informasi yang ada di luar desa. Mengingat pentingnya efisiensi waktu dan biaya yang harus dikelarkkan hal tersebut dapat menunjang pekerjaan staff misalnya dalam mengirim berkas ke kantor kecamatan atau kabupaten tanpa harus datang ke tempat.

Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa terjadi perbedaan peran dan kekuasaan juru kunci sebelum dan sesudah diadakannya PILKADES. Perbedaan yang sangat mencolok yakni pada aspek kekuasaan politik yang dimiliki juru kunci karena posisinya telah digantikan oleh kepala desa. Didukung dengan adanya peraturan tentang kewenangan, hak, kewajiban dan larangan yang harus ditaati kepala desa. Peraturan tersebut dijelaskan dalam UU Desa Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan:

“Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa”.

Ibu R telah melaksanakan isi dari UU Desa tersebut sejak kepemimpinannya pada periode pertama hingga kedua. Seperti yang telah diatur dalam UU tersebut di atas. Ketika menjalankan tugasnya sebagai kepala desa Ibu R tidak serta merta menerapkan programnya sendiri, tetapi meminta persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Tidak lupa juga meminta pendapat kepada juru kunci khususnya dalam kegiatan keagamaan. Mengingat juru kuncilah yang memegang peran dalam kegiatan dalam bidang keagamaan di desa,

begitu sebaliknya apabila ada tamu yang ingin berziarah ke makam keluarga Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat maka harus memberi tahu kepala desa.

Berdasarkan penuturan juru kunci kesepuluh (tanggal 9 April 2016) apabila ada tamu yang hendak berziarah adalah tamu besar seperti rombongan peziarah kalangan pejabat maka beliau harus memberi surat izin tertulis kepada desa atau hanya dengan mengisi daftar buku tamu yang berkunjung ke makam, karena ada peraturan semacam itu yang diadakan desa. Tujuannya untuk mengisi daftar tamu guna program berkelanjutan yang dibuat oleh kepala desa perempuan. Program keberlanjutan yang dimaksud adalah Desa Pakuncen akan dijadikan sebagai “Desa Wisata dengan tema Sejarah dan Religi”.

Program tersebut telah Ibu R programkan pada periode keduanya sebagai kepala desa. Menurut masyarakat Ia selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun desa. Senada dengan yang dituturkan oleh Ibu R (tanggal 25 April 2016) bahwa dalam kepemimpinannya di Desa Pakuncen sebagai kepala desa dua periode sekarang ini, Ia selalu berusaha melibatkan masyarakat khususnya pada usia-usia produktif. Menurutnya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan desa sangatlah berperan penting, karena tanpa mereka program yang sudah Ia buat tidak akan berjalan dengan baik. Salah satunya program berkelanjutan Desa Wisata tersebut. Ia beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan pariwisata secara langsung akan melibatkan masyarakat. Keterlibatan tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya dalam hal perekonomian masyarakat setempat. Didorong dengan partisipasi masyarakat dalam

mengembangkan mutu produk-produk wisata setempat yang sudah direncanakan seperti yang diterangkan di atas. Salah satunya mengadakan pembinaan menyablom baju kepada anggota Karang Taruna yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas Desa Wisata Pakuncen.

Motivasi Ibu R membuat Desa Wisata, karena melihat wisata air terjun Sedudo yang masih berada di kawasan Nganjuk tepatnya di Desa Ngliman, Ibu R berinisiatif untuk menerapkannya di Desa Pakuncen. Selanjutnya Ia melakukan rundingan dengan juru kunci dan para staff pembantu desa untuk menjadikan desa setempat menjadi desa wisata, karena menurutnya Desa Pakuncen memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh desa lain. Rundingan tersebut membuahkan hasil yakni terutama juru kunci memberikan izin kepada Ibu R untuk menjadikan makam tersebut sebagai salah satu objek wisata Desa Pakuncen. Dibantu oleh staff Ibu R membuat proposal yang berisi pengajuan desa wisata sebagai program berkelanjutan ke Kantor Pariwisata Nganjuk. Butuh waktu beberapa bulan untuk mendapat persetujuan dan izin berdirinya desa wisata., karena perlu ada survey langsung yang dilakukan oleh pihak Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Jawa Timur.

Benda Cagar Budaya atau peninggalan yang memiliki nilai sejarah berada di wilayah kompleks pemakaman kerabat Keraton Mataram Yogyakarta

Hadiningrat. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Bab I yang menyatakan bahwa:

1. Benda Cagar Budaya adalah

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.

Benda cagar budaya yang dimaksud ada di Desa Pakuncen diantaranya:

1. Masjid kuno yang dulunya bernama Masjid Kauman menjadi Masjid Baitur Rohman.
2. Dua buah gentong yang terbuat dari batu asli berada di sebelah kanan dan kiri gerbang pertama makam. Konon airnya memiliki kesaktian yakni hanya dengan membasuh muka kemudian membuat pengakuan, apabila pengakuan yang dibuat salah atau bohong maka akan menanggung akibatnya misalnya sakit.
3. Kompleks pemakaman priyai-priyai agung dari Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat.
4. Pohon beringin di sebelah utara perempatan jalan Desa Ngrombot, konon dijadikan sebagai tempat melaksanakan hukuman mati.
5. Kolam, konon dijadikan sebagai tempat jamuan para tamu asing sekaligus tempat pemandian para Kadang Sentono.
6. Kompleks pemukiman para Kadang Sentono.

Berdasarkan benda cagar budaya yang dinyatakan oleh pihak BP3 dapat dijadikan sebagai Desa Wisata. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016 Desa Pakuncen menjadi Desa Wisata. Desa Pakuncen mendapat bantuan berupa plang penunjuk Desa Wisata di Pakuncen dari Kantor Pariwisata Nganjuk.

3.4 Kepala Desa Perempuan Mampu Mempengaruhi Masyarakat Desa dalam Menjalankan Program Kerjanya (Proker)

Kepala desa sebagai seorang birokrat memiliki tugas yang harus dilaksanakannya yakni membuat kebijakan dan mengarahkan masyarakat pada tujuan tertentu untuk mewujudkannya. Masyarakat juga memegang peran penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat kepala desa, karena tanpa adanya tindakan dan respon yang baik dari masyarakat tidak akan berjalan. Selain masyarakat, staff pembantu selaku bawahannya juga berperan dalam mengkoordinasi setiap kebijakan yang dibuat kepala desa atas persetujuan BPD. Hubungan para staff dengan kepala desa terjadi secara spontan, karena sifat kewibawaan kepala desa yang harus dihormati. Perilaku politik yang dilakukan oleh kepala desa tidak dapat dipisahkan dengan hubungan sosial yang dibangunnya selama ini. Hal tersebut mewajibkan kepala desa harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, begitu juga sebaliknya. Perilaku tersebut merupakan salah satu tujuan kepala desa dalam mencari nilai-nilai khusus seperti mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat. Apabila hal tersebut tercapai, maka akan semakin memberi dorongan masyarakat dalam memberikan partisipasi politik. Partisipasi yang dilakukan oleh kepala desa juga memiliki kepentingan pribadi yakni untuk melanggengkan kekuasaannya, yang

maksimal dapat diembannya hingga 2 periode lamanya. Hal ini terbukti dengan periode yang diemban oleh Ibu R selama 2 periode berturut-turut menjadi pemimpin yakni sebagai kepala desa.

Menurut Kartono (2011: 38), pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kelebihan, sehingga mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengontrol dan membimbing bawahannya untuk tujuan tertentu.

Kepemimpinan merupakan hubungan yang terjadi antar manusia. Hubungan antar masyarakat dan bawahannya adalah hubungan mempengaruhi (berasal dari pemimpin) dan kepatuhan yang harus dijalankan bawahannya karena dipengaruhi atas kewibawaan seorang pemimpin. Kepatuhan oleh bawahannya terhadap pemimpin dipengaruhi adanya kekuatan dari pemimpin yang secara spontan timbul hubungan tersebut (2011: 2).

Kebijakan yang dibuat oleh Ibu R yakni diwujudkan dengan mengadakan berbagai proker di desa dan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan setempat. Proker yang diadakan yakni pada periode pertama setelah terpilihnya Ibu R menjadi kepala desa, Ia membuat program-program di desa. Program yang direlisasikannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Periode pertamanya Ia membuat program arisan ibu-ibu setiap minggu sore, dan mengadakan posyandu untuk balita dan lansia usia di atas 30 tahun. Menurut Ibu I selaku ketua PKK Desa Pakuncen tahun 2006 yang sekaligus teman sekolah Ibu R mengungkapkan bahwa Ibu R sangat antusias mengajak masyarakat setempat untuk peduli dengan kesehatan anak dan diri sendiri. Ia rajin mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena jika lingkungan bersih

maka akan jauh dari penyakit. Selain itu Ia juga menunjang program kesehatan tersebut dengan mengadakan senam sehat untuk semua yang ingin ikut serta, tetapi mayoritas pesertanya datang dari ibu-ibu dan bapak-bapak lansia. Senam tersebut dipandu oleh pemandu senam yang berasal dari Kertosono. Didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu I:

“Iya itu program itu juga Bu Renynya sangat mendukung sekali dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Baik dari segi pendanaan atau pembiayaan maupun pengkondisiannya sangat bagus sekali” (Wawancara dengan Ibu I tanggal 30 Maret 2016).

Pada periode kedua Ia membuat program membuat rumah usaha yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

Rumah usaha dibangun di depan masjid Baitu Rohman agak menyamping ke sebelah utara. Adanya rumah usaha tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk menitipkan barang di rumah usaha tersebut. Tidak hanya itu saja, Ibu R juga meminta remaja putra dan putri untuk membuat usaha sendiri yang nantinya bisa dititipkan di rumah usaha dengan syarat bagi hasil. Bagi hasil tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam pemasukan uang khas desa, tujuannya kembali lagi untuk kepentingan desa. Para remaja ini membuat usaha sablon yang ditempatkan di salah satu rumah masyarakat setempat (masih pada tahap pemesanan alat sablon). Dengan begitu remaja bisa belajar bagaimana cara menjalankan usaha dan mengatur keuangan demi mendatangkan keuntungan.

Tidak seluruhnya masyarakat Desa Pakuncen setuju dengan proker yang dibuat oleh kepala desa perempuan. Salah seorang masyarakat setempat mengaku bahwa dirinya tidak setuju dengan diadakannya rumah usaha. Ketidak setujuannya

tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya pengadaan rumah usaha tersebut bukannya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya. Bagi pengusaha-pengusaha kecil seperti warung atau toko yang menyediakan *snack* atau jajanan ringan, sembako, atau barang dagangan lainnya yang nantinya dijual oleh rumah usaha tersebut akan terancam rugi. Ia khawatir akan hal itu, karena Ia adalah masyarakat setempat yang bekerja sebagai wirausaha yang berada di Desa Pakncen. Kekhawatiran tersebut tidak hanya dirasakan olehnya saja meskipun rumah usaha belum berjalan dengan baik, tetapi juga beberapa wirausaha lainnya dalam perbincangan mereka disela waktu luang. Pembagian hasil antara produsen dengan pihak desa dirasa memberatkan bagi produsen, karena apabila barang produksinya dijual sendiri oleh produsen keuntungannya akan lebih banyak (Wawancara dengan Pak R tanggal 22 Juni 2016). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa perempuan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi masyarakat setempat untuk mendukung prokernya. Ia harus lebih berusaha lagi dalam meyakinkan masyarakat untuk mendukungnya.

Ibu R tidak hanya tinggal diam melihat respon masyarakat yang tidak setuju dengan prokernya. Ia berusaha mengatasinya dengan memberi pemahaman kepada masyarakat yang tidak setuju dengan mengundang para wirausaha terlepas bagi mereka yang setuju atau yang tidak untuk datang ke aula dekat kantor balai desa. Undangan tersebut ditujukan untuk mendengar keluh kesah atau keinginan mereka terkait usaha yang sudah dimiliki masing-masing wirausaha dengan rumah usaha. Kesepakatan yang didapatkan sebelum direalisasikan rumah

usaha tersebut salah satunya diharapkan harga jual barang dagangan yang dititipkan di rumah usaha tidak jauh berbeda atau tidak terlalu lebih murah dibanding penjualan di warung-warung atau toko sekitar dengan tujuan menjaga pembeli yang sudah menjadi pelanggan tidak beralih ke rumah usaha. Ibu R menyetujui kesepakatan tersebut, Ia tetap merealisasikan rumah usaha tersebut berjalan berdasarkan hasil atau suara terbanyak dari masyarakat setempat yang setuju dengannya (wawancara dengan Pak R 22 Juni 2016).

3.5 Persepsi Masyarakat terhadap Kekuasaan Kepemimpinan Kepala Desa

Perempuan

Pemimpin di Desa Pakuncen khususnya pada periode Ibu R atau pemimpin perempuan menimbulkan persepsi baru yang muncul dari masyarakat tentang kepemimpinan perempuan. Pengertian persepsi adalah suatu pandangan, pengamatan atau tanggapan individu terhadap benda, tingkah laku manusia, suatu fenomena, dan berbagai hal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari (Luthfi dan Wijaya, 2011: 31). Dalam bab ini yang dimaksud adalah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan.

Selama ini politik dipandang sebagai aktivitas yang dipegang oleh laki-laki. Dimana dalam politik dituntut adanya kemandirian, kewibawaan, kebebasan berpendapat, sifat agresif, dan rasional dianggap tidak dapat ditemukan dalam diri perempuan. Dunia politik memang sangat identik dengan kepemimpinan. Ketika seorang perempuan menduduki posisi tersebut, maka perempuan mungkin saja mengalami banyak hambatan dari pada laki-laki. Hal tersebut dikarenakan

perempuan harus bisa membuktikan kepada semua masyarakat atau bawahannya bahwa dirinya mampu dan pantas untuk diandalkan. Perempuan perlu memiliki sifat yang agresif, agresif dalam artian mengambil ide, berani mengemukakan pendapat, memimpin orang lain, membuat kebijakan demi tujuan yang baik, dan mampu membela dirinya dalam situasi yang terjadi dalam politik. Mayoritas perempuan masih sangat kecil potensinya dalam memiliki sifat agresif ini terutama pada kalangan perempuan desa yang masih sangat menerapkan nilai dan norma sebagai perempuan.

Ketimpangan gender dalam politik yang terjadi sampai sekarang tidak akan berubah apabila tidak ada tindakan khusus dari perempuan dengan tujuan menyetarakan gender. Kesetaraan gender menurut Remiswal (2013: 7) adalah bentuk kemitrasejajaran antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Berbagai peran yang dikonstruksikan pada keduanya melalui sosial budaya masyarakat seharusnya tidak mendiskriminasi perempuan khususnya dalam politik. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mengapresiasi hak dan kewajibannya, karena hal tersebut mempengaruhi potensi yang dimiliki individu.

Dengan memiliki wawasan gender yang baik, maka kemitrasejajaran antara laki-laki dengan perempuan pada seluruh aspek kehidupan akan berjalan secara beriringan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan hak manusia sebagai makhluk sosial.

Pembagian peran kerja laki-laki yang mendominasi kegiatan politik dengan perempuan yang identik pada pekerjaan domestik seringkali menimbulkan

adanya kesenjangan gender, karena pola pikir manusia yang tertanam sejak kecil mempengaruhi persepsi mereka dalam hal tersebut. Faktor utama yang menjadi penghambat perempuan untuk mengambil peran dalam politik yakni adanya persepsi bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, perlu akal yang cerdas, penuh dengan perdebatan. Semua persepsi tersebut diasumsikan adalah milik laki-laki yang dianggap kuat dan berwibawa. Perempuan dianggap tidak memiliki potensi dalam politik karena perempuan adalah penghuni domestik, yang dianggap tidak berfikir secara rasional, takut dalam mengambil segala resiko. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan selalu menggunakan ego atau hati dalam mengambil keputusan. Senada dengan pendapat Naqiyah.

Menurut Naqiyah (2005: 64) perempuan dinilai tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan membuat kebijakan, karena sikap lemah lembut yang dimiliki perempuan membentuk perempuan sangat tendensius yakni perempuan selalu mengutamakan perasaan, sehingga jauh dari sikap rasional. Persepsi tersebut sudah melekat pada diri perempuan maupun laki-laki. Didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu I:

“Kalo saya pribadi tidak, kalo dari warga-warga kemarin sebelum pemilihan itu dimulai ada sempat yang begitu. Apa iya mampu jadi pemimpin padahal ia seharusnya jadi ibu rumah tangga, tapi saya berkeyakinan dengan kemampuan yang dimiliki dan pengetahuan yang dia punyai. Dari pendidikannya dari pelatihan-pelatihan yang diikuti saya yakin dan akhirnya memang terbukti sampai sekarang ini. Desa kami semakin maju dibawah kepemimpinannya Bu Reny” (Wawancara dengan Ibu I tanggal 30 Maret 2016).

Konsep gender menurut Tri Marhaeni Pudji Astuti (2011: 3) dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Konsep Gender menurutnya adalah suatu sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Hal

tersebut disebabkan oleh adanya konstruksi masyarakat secara sosial-budaya.

Proses konstruksi berlangsung secara terus-menerus dan dilanggengkan dalam berbagai nilai dan norma sosial yang terdapat pada masyarakat, sehingga seolah-olah sifat laki-laki dan perempuan melekat pada masing-masing individu.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Desa Pakuncen dibuktikan oleh Ibu R yang berhasil menduduki posisi sebagai kepala desa.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang bahwa desa ini pertama kalinya dipimpin seorang perempuan tahun 2009 sampai dengan sekarang, sebelumnya desa ini dipimpin oleh laki-laki. Berdasarkan data di lapangan masyarakat sangat antusias dalam mengamati dan mengikuti setiap perkembangan kemajuan desanya. Menurut data yang diperoleh selama di lapangan mengatakan bahwa kepemimpinan masa laki-laki dengan perempuan sangat berbeda jauh.

Dibandingkan dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya yang dipegang laki-laki, menurut hasil pemaparan yang dilakukan oleh Ibu I, pemimpin laki-laki pada zaman dulu tidak memperhatikan pembangunan desa, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan hanya memegang semboyan “disiplin”

(hanya omong kosong yang artinya tidak dilaksanakan dengan baik). Semboyan tersebut diterapkan pada kegiatan desa seperti pengajian di makam keluarga

Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh juru kunci, tetapi Ia sendiri sering datang terlambat dengan berbagai alasan. Selain itu apabila dimintai tolong untuk melayani surat menyurat tidak segera dilaksanakan, kecuali diberi amplop oleh orang yang berkepentingan dengan berisikan sejumlah uang.

Masyarakat tidak ada yang protes pada waktu itu, karena mereka takut atau sungkan dengan posisi yang dianggap wibawa tersebut.

Kepemimpinan sangat jauh berbeda dengan masa kepemimpinan di bawah seorang kepala desa perempuan oleh Ibu R selama dua periode ini sangat berjalan dengan baik. Terbukti dengan hasil-hasil yang telah dicapai hingga sekarang ini,

Ibu R memberikan hasil yang sangat memuaskan dalam melaksanakan pembangunan demi memajukan desa berhasil. Salah satunya Desa Pakuncen resmi dijadikan sebagai Desa Wisata. Dibuktikan dengan hasil wawancara di lapangan oleh Ibu I:

“Wah iya beda to Mbak Hesti kalo mungkin dari kepemimpinannya Pak M sama Pak P itu lebih menekankan pada kedisiplinan nomor satu, tetapi kalo Bu Reny ini disamping kedisiplinan dia juga bersifat luwes, supel, fleksibel gitu. Jadi ketika menanggapi masalah itu dia tidak langsung seperti ini pasal berapa pasala berapa gitu tidak, tapi dia lebih dari hati ke hati menanganinya. Jadi warga di sini sukanya di situ jadi ada hubungan silaturahmi itu yang tetap dijaga. Kemudian dari Ibu R sendiri itu juga empati dan simpatinya itu dikedepankan. Jadi dia itu ikut merasakan penderitaan orang lain itu yang lebih menyentuh”. (Wawancara dengan Ibu I tanggal 02 April 2016).

Selain berhasil membangun Desa Pakuncen, Ibu R juga memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan administrasi dan non-administrasi. Pelayanan administrasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu R diantaranya memberikan penyuluhan pentingnya

membuat dan memiliki E-KTP sesuai dengan peraturan pemerintah, memberikan respon yang cepat ketika ada masyarakat yang sedang mengurus surat-menyurat, segera membenahi apabila ada komplain dari masyarakat misalnya kesalahan dalam pengetikan nama. Didukung oleh pernyataan Ibu Su, menurutnya Ibu R memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap masyarakat setempat, sangat

antusias, dan tidak malas apabila dimintai tanda tangan. Ibu R selalu mengutamakan pelayanan masyarakat. Kepala desa dan para staff pembantu harus melayani masyarakat dengan baik, ramah, dan sopan. Sedangkan pelayanan non-administrasi lebih berbentuk fisik dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat setempat misalnya pembangunan infrastruktur yang meliputi perbaikan jalan, peningkatan pendidikan, dan dijadikannya desa wisata.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan kultural di Desa Pakuncen yang dipegang oleh keturunan langsung Kyai Nurjalipah berjenis kelamin laki-laki. Keturunannya berstatus sebagai juru kunci sekaligus penguasa tunggal atau lurah (sebutan pada zaman dulu). Keturunan Kyai Nurjalipah tidak lagi memiliki status ganda setelah diterapkannya UUD Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 5 Tentang Pemerintahan Desa. Keturunannya hanya berstatus sebagai juru kunci namun sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak kesultanan Mataram dengan Kyai Nurjalipah. Pada tahun 1992, Desa Pakuncen menerapkan pemilihan kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat. Dua periode pertama kepala desa dijabat oleh laki-laki berlainan orang, sedangkan periode selanjutnya dijabat oleh perempuan yakni Ibu R selama dua periode berturut. Ibu R memberikan pelayanan masyarakat dengan sangat baik mulai dari pelayanan administrasi hingga non-administrasi yang bertujuan untuk memajukan Desa Pakuncen. Pada bab selanjutnya akan membahas modal sosial yang dimiliki

Ibu R untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat dalam mendapatkan kekuasaan politik di desa.

BAB IV

MODAL SOSIAL KEPALA DESA PEREMPUAN

Bab ini akan membahas tentang usaha dan modal sosial yang dimiliki oleh kepala desa perempuan di Desa Pakuncen untuk meraih kekuasaan di dalam politik tingkat lokal atau desa sebagai kepala desa. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh kepala desa tersebut terhadap masyarakat setempat yang bertujuan untuk mendapatkan banyak dukungan ketika PILKADES berlangsung. Selain itu juga modal sosial apa saja yang Ia miliki sehingga bisa dipercaya masyarakat setempat untuk menjadi seorang kepala desa. Selanjutnya akan dijelaskan suasana kemenangan Ibu R ketika berlangsungnya PILKADES di Desa Pakuncen pada periode kepemimpinan perempuan oleh Ibu R tahun 2009 dan 2014.

4.1 Putra Daerah Menjadi Isu Penting dalam Politik

Isu putra daerah menjadi penting dalam meraih kekuasaan khususnya dalam hal ini adalah politik Putra daerah memiliki peran yang sangat besar untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat. Ibu R menjadi salah satu kepala desa yang memegang status sebagai putra daerah yakni Ia adalah orang asli dari Desa Pakuncen. Masyarakat setempat merindukan pemimpin seorang putra daerah seperti halnya sejarah kepemimpinan Desa Pakuncen dizaman dahulu, tetapi bukan berarti diturunkan ke generasi selanjutnya. Keinginan masyarakat setempat terhadap pemimpin yang memiliki *basic* putra daerah merupakan bagian dari modal sosial.

Modal sosial adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap individu. Kepercayaan dari masyarakat dan orang-orang disekitarnya merupakan kekuatan bagi individu dalam menentukan berhasil atau tidaknya seseorang mendapatkan posisi dalam politik tingkat desa yakni menjadi kepala desa. Kepercayaan masyarakat terhadap putra daerah untuk memimpin desa setempat masih sangat dipegang teguh, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa negara memberikan peluang bagi masyarakat pendatang untuk menjadi kepala desa, setelah memenuhi persyaratan sebagai kepala desa salah satunya bertempat tinggal sekurang-kurangnya dua tahun di desa setempat secara berturut-turut. Peraturan tersebut diatur dalam UUD RI Tahun 1979 No. 5 Pasal 4 huruf g yang berbunyi “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun terakhit dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang di luar desa yang bersangkutan”.

“.....Bu Reny itu juga teman saya di pengajian ya tetangga. Karena ada pemilihan kepala desa lagi setelahnya Pak P, Bu Reny itu sama orang-orang disuruh mancalonkan jadi kepala desa, karena orang-orang ingin yang menjadi kepala desa itu orang asli Desa Pakuncen yang sudah mengenal warganya. Sejak kecil sudah mengerti warganya dan sejarah desa. Kalau orang pendatang seperti lurah sebelumnya tidak mbak. Bu Reny itu orangnya baik, ramah tamah, lincah sama semua warga itu baik. Orang-orang pengajian itu tau semua, jadi disuruh jadi kepala desa. sampai akhirnya Bu Reny itu menang” (wawancara dengan Ibu S tanggal 19 Maret).

Berdasarkan informasi tersebut membuktikan bahwa masyarakat percaya bahwa putra daerah lebih baik dibanding orang pendatang dalam memimpin Desa Pakuncen. Rasa percaya masyarakat terhadap putra daerah dalam memimpin

karena didasari adanya hubungan sosial yang erat. Kepercayaan tersebut dipaparkan oleh Ibu Ko, apabila pemimpin desanya berasal dari masyarakat asli desa sendiri diharapkan akan lebih baik. Harapan lebih baik dikarenakan individu yang bersangkutan sudah mengerti sejarah desa setempat dan sudah mengenal masyarakatnya dengan baik apabila dibandingkan dengan pendatang. Ibu R setidaknya sudah memiliki kunci utama atau modal sosial untuk mendukungnya yakni masyarakat percaya terhadapnya, karena Ia adalah orang asli Desa Pakuncen sebut saja Putra Daerah.

Hubungan sosial akan terbangun secara baik apabila dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hubungan sosial pada dasarnya dibangunnya seorang individu sejak masih dini hingga meninggal. Besarnya intensitas hubungan memberi pengaruh yang menguntungkan bagi individu yang bersangkutan. Hubungan yang baik adalah dibangun dengan sikap dan tujuan yang baik, maka akan menuai hasil yang baik pula baginya. Seperti halnya Ibu R adalah putra daerah dari Desa Pakuncen, Ia memiliki ayah dan ibu yang berasal dari Desa Pakuncen. Sejak lahir hingga sekarang Ia tetap tinggal di Pakuncen, sehingga hubungan sosial yang Ia bangun sejak kecil dengan masyarakat setempat sudah sangat lama. Atas dasar tersebut Ibu R sudah sangat mengenal masyarakat setempat, begitu pula sebaliknya masyarakat juga mengenal sosok Ibu R. Tidak berhenti pada hubungan sosial yang memberikan identitas Ia sebagai putra daerah, tetapi Ia juga membangun hubungan sosial melalui partisipasi dalam organisasi yang diadakan di desa. Senada dengan pendapat John Field tentang teori modal

sosial yang akan digunakan untuk menganalisis temuan data lapangan. Sebagai berikut teori yang dipaparkan oleh John Field:

Teori modal sosial menurut John Field dalam bukunya yang berjudul *Social Capital*. John menekankan bahwa modal sosial itu berawal dari dua kata yakni “soal hubungan”. Menurutnya upaya membangun suatu hubungan dengan sesama manusia dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan hingga sepanjang masa. Hubungan dengan sesama manusia maksudnya adalah adanya hubungan sosial. Hubungan tersebut akan membantu seseorang dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan, karena seseorang tidak dapat mencapai dengan upaya sendiri tanpa bantuan orang lain khususnya yang ada di sekitarnya. Melalui serangkaian jaringan orang dapat melakukan hubungan, menurut John Field sejauh mana hubungan tersebut akan menjadi sebuah daya maka dapat dikatakan sebagai modal sosial (Field. 2014: 1-2).

Ibu R juga memiliki bakat dalam hal politik yang diturunkan dari ayahnya. Semasa hidupnya ayah dari Ibu R adalah salah satu pelaku politik di Desa Pakuncen. Almarhum ayahnya pernah menjabat sebagai modin (istilah zaman sekarang), tetapi dulu jabatan ini diistilahkan dengan sebutan ustad. Ayahnya dipercaya masyarakat setempat dalam hal keagamaan misalnya seperti mengurus jenazah orang meninggal dunia, mencatat kematian masyarakat setempat, mengajar *ngaji*, memimpin doa dalam tahlilan di rumah masyarakat. Masyarakat menilai ayahnya baik dalam melaksanakan tugasnya dan disegani oleh masyarakat hingga meninggal dunia.

Setelah ayahnya meninggal, tanpa diminta oleh masyarakat untuk meneruskan posisi ayahnya, Ia meneruskan tugas ayahnya. Setelah satu tahun lebih enam bulan lamanya Ia melaksanakan tugas ayahnya banyak masyarakat yang senang, karena tidak terjadi kekosongan pada posisi tersebut. Akhirnya masyarakat menyuruh melanjutkan tugas yang diemban oleh ayahnya semasa hidup. Akhirnya Ia menyanggupi permintaan tersebut, karena Ia berfikir hanya ingin membantu masyarakat. Mengingat masyarakatnya yang berjumlah sangat sedikit menurut beliau tidak terlalu susah untuk menyanggupinya. Selama satu tahun lebih enam bulan lamanya Ia menggantikan tugas ayahnya tidak ada yang bersedia menggantikannya. Suatu ketika Ia berinisiatif untuk memberikan tawaran sebagai modin kepada masyarakat setempat tetapi tidak ada yang bersedia menggantikannya, hingga pada akhirnya Ia mengundurkan diri. Pengunduran dirinya disebabkan karena masyarakat memintanya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Bakat Ibu R sudah mulai terlihat dari kesanggupannya menjadi seorang modin. Ia mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan sebagai modin yang dilakukannya. Modal sosial selanjutnya yang dimiliki Ibu R yakni mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam hal politik. Tidak disangka berawal dari menjadi modin tersebut banyak masyarakat yang merespon baik, hingga Ia diminta berkiprah di ranah politik yang lebih menonjol di desa. Masyarakat meminta Ibu R mencalonkan diri menjadi kepala desa di Desa Pakuncen. Selain masyarakat melihat dari identitas putra daerah

yang melek padanya, mereka juga menilai kinerja yang dilakukan Ibu R sebagai bahan pertimbangan sebelum menyuruh Ibu R mencalonkan diri menjadi kepala desa. Ia berfikir berulang-ulang dan berdiskusi dengan suami dan keluarganya sebelum akhirnya menyanggupi permintaan masyarakat tersebut.

Dewasa ini menempati kursi politik mulai tingkat nasional atau negara hingga lokal seperti di wilayah pedesaan memang bukan menjadi hal yang tabu bagi kaum perempuan seperti Ibu R. Ia berkiprah kedalam politik lokal dengan dorongan masyarakat yang mayoritas berasal dari kaum perempuan. Alasan utama mereka mendukung Ibu R untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Pakuncen, karena semenjak dilaksanakannya PILKADES di Desa Pakuncen belum pernah desanya dipimpin oleh orang asli dari Desa Pakuncen sendiri, melainkan seorang pendatang.

Pada tahun 1992 Desa Pakuncen pertama kalinya melaksanakan PILKADES. Pada periode pertama tersebut, kepala desa dimenangkan oleh seorang laki-laki bernama Pak M berasal dari luar desa yang memiliki istri orang Pakuncen dan berdomisili di Pakuncen. Selanjutnya periode kedua PILKADES tahun 2001 Desa Pakuncen dipimpin seorang laki-laki yang berasal dari luar desa seperti halnya Pak M. Periode kedua dimenangkan oleh Pak P yang juga memiliki istri orang Pakuncen dan berdomisili di Pakuncen. Awalnya Ibu R tidak bersedia dicalonkan untuk menjadi kepala desa, karena tidak terfikir olehnya untuk maju menjadi kepala desa. Adanya tujuan tersirat yang diungkapkan oleh pendukungnya yang menyatakan bahwa masyarakat ingin desanya dipimpin oleh

orang yang berasal dari Desa Pakuncen sendiri. Berikut pernyataan dari hasil wawancara:

“.....saya disuruh warga yang kebanyakan ibu-ibu pengajian disuruh mencalonkan diri menjadi kepala desa, karena yang menjadi kepala desa sebelum saya itu selalu orang luar. Maksudnya orang yang berasal dari luar Desa Pakuncen mbak. Sedangkan warga sini itu kepengene dipimpin oleh orang asli dari Pakuncen sendiri. Awalnya saya ragu apa iya saya bisa menang? gitu mbak Hesti, soalnya lawan saya itu laki-laki (Pak Parna) mantan lurah dulu. Tapi saya terus berdoa dan berusaha menunjukkan kalau saya itu juga bisa menjadi kepala desa. Ya siapa tau bisa bagus gitu too mbak. Apalagikan yaa dapat dukungan dari ibu-ibu pengajian warga sini itu mereka mendukung saya terus. Saat itu tahun 2009 bulan Juli pertama kali saya mengikuti PILKADES dan alhamdulillah saya menang mbak” (Wawancara dengan Ibu R, tanggal 17 Maret 2016).

Meskipun pada akhirnya Ia menyanggupi permintaan tersebut, tetap saja terlintas dalam benaknya akan keraguan atas kemenangannya sebagai kepala desa.

Keraguannya tersebut bukan karena serta merta Ia takut dengan lawannya, tetapi Ia berkaca dari sejarah desa. Apabila dilihat dari sejarah kepemimpinan di Desa Pakuncen menunjukkan bahwa dari awal berdirinya desa hanya laki-laki yang bisa menjabat sebagai kepala desa. Sejarah kepala desa laki-laki berawal dari keturunan Kyai Nurjalipah hingga keturunannya ketujuh. Meskipun pemilihan kepala desa yang dipilih secara *lineages* sudah diubah menjadi demokrasi diatur dalam UUD RI Tahun 1979 No. 5 Pasal 4, tetapi tetap saja laki-laki yang berani mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Keputusan yang diambil oleh Ibu R untuk menyanggupi permintaan tersebut menunjukkan bahwa Ia ingin mengubah sudut pandang terhadap perempuan Jawa sekarang. Di zaman modern sekarang ini perempuan bukan lagi dipandang sebagai kaum yang lemah yang tidak dapat berkiprah di ranah politik.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pendapat Sihite tidak berlaku lagi pada

zaman modern sekarang ini. Sihite (2007: 230) berpendapat bahwa perempuan Jawa itu harus lembut, tidak boleh agresif, tergantung, pasif dan bukan pihak yang bisa menentukan atau mengambil keputusan. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai seorang yang aktif, agresif, mandiri, pihak yang bisa menentukan atau mengambil keputusan dan dominan. Pada ranah domestik seorang perempuan itu masih dianggap sebagai "*konco wingking*", "*suargo nunut, neraka katut*" ("*teman belakang*", "*surga numpang, neraka ikut*"). Hal tersebut mempengaruhi keterlibatan perempuan pada ranah publik baik dalam lembaga pemerintahan atau swasta masih tertinggal jauh dengan kaum laki-laki (Sihite. 2007: 230).

4.2 Bondo Sitik Iso Menang

Pada dasarnya dalam proses menjadi seorang kepala desa membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran hingga calon terpilih menjadi pemenang kepala desa. Sebelum mencalonkan diri menjadi kepala desa, seorang calon kepala desa harus menyiapkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan BPD untuk membayar administrasi pendaftaran. Selain memenuhi biaya administrasi, calon kepala desa diberi waktu untuk mempromosikan diri. Pada masa-masa ini digunakan setiap calon kepala desa yang sudah diumumkan namanya lolos menjadi calon kepala desa untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat setempat sebagai calon kepala desa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan diri. Mayoritas kepala desa melakukan konvoi untuk ajang promosi. Acara konvoi diketahui membutuhkan banyak biaya untuk menunjang keberlangsungannya. Kata konvoi

dalam KBBI memiliki makna kegiatan iring-iringan kendaraan dalam suatu perjalanan bersama.

Berbekal pendidikan akhir tingkat SMA dan sudah memenuhi semua persyaratan lainnya sebagaimana yang tertera di dalam UUD RI No. 5 Tahun 1979 Pasal 4 yang memaparkan persyaratan calon kepala desa. Ibu R segera memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan kemudian berangkat untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa ke kantor BPD. Ia mendaftarkan diri dibantu dan ditemani oleh suaminya. Suaminya membantu Ibu R dari masa jabatan periode pertama hingga kedua, tetapi setelah Ibu R terpilih lagi sebagai kepala desa periode kedua suaminya meninggal dunia tepat setelah 4 hari pengumuman atas kemenangan dirinya sebagai kepala desa. Suaminya meninggal karena terkena penyakit liver. Dukungan suaminya sebelum meninggal terlihat dari bagaimana usaha yang dilakukannya. Hal tersebut dipaparkan oleh Ibu R bahwa suaminya ikut antusias membantunya dari awal hingga akhir yakni pendaftaran, memberi dukungan moral dengan selalu memberi suport kepadanya dan material untuk memenuhi kebutuhan finansial, hingga terpilihnya Ibu R menjadi kepala desa. Selain mendapat dukungan dari suaminya, Ia juga mendapat dukungan dari anggota keluarganya dan kedua anaknya, karena anaknya yang ketiga saat periode pertama belum ada dan saat periode kedua masih berusia 1 tahun.

Modal sosial itu saja belum cukup untuk membuatnya menang dalam ajang PILKADES. Modal sosial yang dimiliki Ibu R sesuai dengan hasil

wawancara sebelumnya menunjukkan adanya kepercayaan yang mayoritas dari kelompok ibu-ibu pengajian untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Kepercayaan dapat dimiliki individu dengan berbagai cara diantaranya berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi, sikap aktif yang memberikan inovasi atau solusi terhadap masalah, dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlangsung di masyarakat setempat. Sesuai dengan pendapat John Field yakni menyatakan bahwa serangkaian jaringan di dalamnya juga terdapat kepercayaan dari orang-orang sekitar. Dalam modal sosial, jelas sekali bahwa kepercayaan juga memiliki peran dalam merepresentasikan berbagai cara untuk mengkasas sumber daya. Kepercayaan dari seseorang terhadap Anda memiliki peran yang sangat vital dalam memperoleh akses manfaat dari jaringan sosial (Field, 2014: 103).

Ibu R berpartisipasi dalam berbagai hal diantaranya pengajian yang diadakan oleh Desa Pakuncen. Di Desa Pakuncen ini ada kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan golongan usia. Ada pengajian untuk anak-anak dan remaja: putri dan putra, pengajian orang tua: ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk golongan anak-anak dan remaja dilaksanakan setiap hari kamis jam 19.00 WIB, sedangkan untuk orang tua yang ibu-ibu setiap hari minggu jam 19.00 WIB dan bapak-bapak setiap jumat legi jam 19.00 WIB malam. Semua dilaksanakan di rumah masyarakat setempat secara bergilir dengan diadakan arisan. Lain halnya pengajian untuk bapak-bapak yakni dilaksanakan di Masjid Baitur Rohman jadi tidak diadakan arisan. Peserta pengajian khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak hanya berasal dari masyarakat Pakuncen saja, tapi pesertanya juga datang dari

desa lain yang dekat dengan Desa Pakuncen seperti Patianrowo dan Ngrombot.

Ibu R aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diadakan desa tersebut.

Ia mengikuti pengajian ibu-ibu apabila sedang tidak banyak pekerjaan rumah atau masalah keluarga lainnya seperti bepergian. Menurut penuturannya, Ia senang bisa berkumpul sama tetangga itu. Sikapnya tersebut menunjukkan bahwa Ibu R senang bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya.

Partisipasi dalam kegiatan tersebut menimbulkan adanya *Trust* atau kepercayaan dari masyarakat. *Trust* merupakan salah satu hasil yang diharapkan dalam suatu hubungan bersosialisasi. Ibu R mengandalkan kepercayaan dari orang lain untuk mendukungnya menjadi kepala desa, karena Ia tidak menggunakan uang untuk bertindak curang seperti memberi amplop berisikian sejumlah uang atau sembako kepada masyarakat desa. Ia hanya melaksanakan amanah yang diberikan oleh pendukungnya. Ia terus maju hingga tahap akhir yakni hari dimana dilaksanakan PILKADES. Ada pesan dari ayahnya yang selalu diingat bahkan dijadikan sebagai pedoman hidupnya yakni "*uang bukanlah segala untuk menjadikan orang sukses, selalu bersyukur dan berbuat baik bisa mengantarkanmu pada kesuksesan*". Pesan tersebut Ia buktikan sendiri ketika pendaftaran calon kepala desa periode pertama. Sikap tidak curang yang dilakukan Ibu R dapat dilihat dari pernyataannya sebagai berikut:

"Saya itu mbak mencalonkan diri sebagai kepala desa pas periode pertama, saya benar-benar tidak punya uang banyak. Saya daftar itu pakai uang tabungan, tapi masih kurang mbak. Terus saya diberi pinjaman sama orang, tapi nanti sawah bengkok yang di Rowomarto ditanami orangnya. Setelah saya terima uang dari orangnya yaa sudah habis saya buat biaya administrasi dan saya mengadakan tahlilan kecil gitu mbak sebelum hari H,

agar didoakan biar jadi cuma 20 orang yang saya undang. Soalnya terbentur dana mbak". (Wawancara dengan Ibu R, tanggal 17 Maret 2016).

Dari pernyataan wawancara tersebut bisa dilihat bahwa Ibu R berangkat dari nol ketika mendaftarkan diri menjadi kepala desa. Ia tidak memiliki banyak uang untuk melakukan kegiatan yang mengeluarkan dana terlalu banyak selain untuk biaya administrasi pendaftaran dan kirim doa untuk melancarkan tujuannya menang dalam PILKADES. Menurutnya konvoi akan membutuhkan banyak uang seperti memberi uang bensin permotor dan *pick up*, menyiapkan konsumsi, menyewa sound, menyewa mobil *pick up*, spanduk dan properti lainnya yang mendukung dalam konvoi.

Menurut Ibu N dari hasil wawancara, Ia menjelaskan bahwa iya memang tidak memberi dukungannya kepada Ibu R. Periode pertama Ia mendukung Pak Sb, karena menurutnya beliau memiliki kewibawaan menjadi kepala desa dibandingkan dengan Ibu R. Kewibawaan yang dimiliki oleh Pak Sb yakni Ia bekerja di sebuah pabrik yang tugasnya mencari orang untuk bergabung di pabrik tempat kerjanya, sehingga menurut Ibu N Ia memiliki pengalaman yang banyak.

Pengalaman yang dimaksud oleh Ibu N adalah Pak Sb lebih sering bertemu dengan orang-orang baru dan berbagai karakter yang dimiliki seseorang.

Menurutnya Ia akan lebih bisa memahami bagaimana karakter masyarakat setempat apabila dibandingkan dengan Ibu R. Disamping Ibu R seorang perempuan yang dianggapnya kurang pantas menjadi kepala desa, ketika mengadakan pengajian di rumahnya sebelum hari dilaksanakannya PILKADES,

Ibu R membagikan kerudung kepada beberapa masyarakat setempat dengan

meminta dukungan supaya nanti ketika PILKADES berlangsung pihak yang menerimanya memilih beliau (wawancara dengan Ibu N tanggal 22 Juni 2016).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Ibu R juga melakukan konvoi dengan cara lain yakni membagikan kerudung kepada masyarakat setempat. Pembagian kerudung yang dilakukannya tersebut membuktikan bahwa statusnya menjadi putra daerah saja belum cukup untuk mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat. Menurutnya pembagian kerudung tersebut bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat, bisa dipakai ketika pengajian atau acara lainnya (wawancara dengan Ibu R tanggal 22 Juni 2016). Hal tersebut membuktikan bahwa Ia tidak melakukan praktik *money politic* secara terbuka, karena sejumlah uang tersebut diwujudkan dalam bentuk barang yakni kerudung.

Pembagian kerudung kepada sebagian masyarakat Desa Pakuncen yang dilakukan oleh Ibu R tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu strategi yang dilakukannya dalam mendapatkan dukungan menjadi kepala desa. Kerudung sendiri dapat diketahui sebagai simbol dari agama yakni Islam. Menurut data lapangan, semua masyarakat Desa Pakuncen menganut Agama Islam dan ditunjang dengan berdirinya sebuah pondok pesantren (Ponpes) yakni Ponpes Al-Qomar. Terkait respon dari masyarakat terhadap kerudung tersebut, mereka menganggapnya hanya sebagai *souvenir* bukan praktik *money politic*, sehingga masyarakat menganggapnya lebih baik dari calon lainnya. Strategi yang dilakukannya dirasa lebih baik dan mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat.

Pada periode kedua pencalonannya menjadi kepala desa, Ia tidak melakukan konvoi, apalagi untuk bertindak curang demi menjadi kepala desa.

Ketidak curangan Ibu R dapat terbukti dengan tidak adanya praktik politik uang (*money politic*) dan tidak memberikan barang berupa sembako (bahan pokok makanan; beras, gula, dan minyak) kepada masyarakat Desa Pakuncen. Ia menyadari apabila bertindak curang dalam proses pemilihan itu tidak akan membuat keadaan lebih baik, malah sebaliknya. Berikut pernyataan Ibu R:

“Ooo, ndak mbak Hesti kalau kampanye itukan ya perlu dana banyak to mbak. Sayakan yaa ndak punya, jadi saya ya ndak pernah pakai acara konvoi atau sebar-sebar apa kayak umumnya. Saya hanya minta doa restu pada warga gitu saja misalkan pas pengajian gitukan saya mesti ikut too mbak. Pas pengajian itu saya minta doa kepada ibu-ibu yang hadir di pengajian, pada ibu-ibu PKK di balai desa saya minta doa pokoknya ya gitu saya hanya minta doa dan dukungan supaya berhasil. Saya ndak punya apa-apa kok. Yaa itu kalau malam atau sore gitu saya sama bapaknya itu *door to door* minta doa dan dukungan”. (Wawancara dengan Ibu R, tanggal 28 Maret 2016).

Alasan lain Ibu R tidak melakukan *money politic*, karena apabila melakukan kecurangan dalam proses pemilihan akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan nilai dan norma sosial yang terdapat dalam masyarakat. Di dalam nilai dan norma sosial memiliki sanksi sosial yang bertujuan untuk mencegah seseorang berbuat menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Pak B, bahwa Ia pernah diberi uang oleh salah satu calon kepala desa pada PILKADES kedua. Ia berfikir apabila sekarang saja berani menyuap untuk membantu calon tersebut, takutnya ketika Ia ada perlu bisa-bisa akan dikenakan biaya. Pak B juga membuat pernyataan bahwa Ia tidak suka pemimpin yang mata duwitan. (Wawancara dengan Pak B, tanggal 1 April 2016).

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa pada pemilihan kepala desa di Desa Pakuncen dulunya pernah terjadi praktik *money politic*. Kejadian tersebut dilakukan oleh salah satu calon kepala desa terdahulu. Ada salah satu calon kepala desa terdahulu yang pernah membagikan sejumlah uang kepada masyarakat. Tujuannya agar Ia mendapatkan banyak dukungan, tetapi malah sebaliknya Ia mendapat sedikit surat suara. Tidak sedikit dari masyarakat yang membicarakan kecurangannya tersebut dan menilai bahwa tindakan tersebut tidak baik. Didukung dengan pernyataan Pak So yang diberi tawaran salah satu calon kepala desa pada PILKADES kedua untuk paroan sawah bengkok atau bagi hasil. Syaratnya Ia disuruh mencari orang dengan jumlah banyak untuk mendukungnya pada saat PILKADES. Ia tidak menerima tawaran tersebut, karena Ia tidak suka dengan cara tersebut. Mayoritas masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian beranggapan bahwa hati nurani tidak bisa digantikan bahkan dibeli dengan uang. Pada periode kedua masa kepemimpinannya Ia tidak melakukan konvoi berkeliling, tetapi Ia lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Sikap aktifnya tersebut bisa memberikan manfaat baginya pada PILKADES kedua.

Ada faktor lain yang mendukungnya, sehingga bisa menjadi kepala desa. Faktor lain yang dimaksud adalah prestasi dan sikap yang dimiliki oleh Ibu R dalam mengikuti berbagai kegiatan di desa. Sikap aktif yang dimiliki oleh Ibu R dalam kegiatan yang diadakan oleh desa. Sejak Ibu R belum menjadi kepala desa hingga menjadi kepala desa. Ia memiliki rasa partisipasi yang sangat tinggi terhadap setiap kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa modal sosial tidak dibangun secara individual, tetapi lebih cenderung pada kolektif atau sekelompok

orang. Bersosialisasi merupakan salah satu bagian penting dalam memperoleh modal sosial. Modal sosial akan lebih kuat, tergantung seberapa besar kapasitas seseorang dalam bersosialisasi dengan orang disekitarnya untuk membangun jaringan hubungan sosial. Selain berpartisipasi dalam setiap kegiatan, orang yang bersangkutan seperti halnya Ibu R yakni harus mampu berusaha memberikan ide-ide yang membangun sebagai berikut:

“....saya juga mengusulkan diadakan seragam pengajian gitu mbak, maksud saya itu begini biar semuanya terlihat sama. Yaa istilahnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu mbak. Soalnya kalau tidak dipakeki seragam itu takutnya kalau ada orang yang jadi tidak malu datang, terus jadi ndak mau ikut pengajian karena malu. Mungkin dia merasa kurang punya baju bagus atau bagaimana. Orang ndak mesti too mbak, bajunya ada yang bagu ada yang ndak. Yang saya takutkan orang yang bajunya kurang bagus nanti kok merasa malu mau ikut pengajian kayak gitu loo mbak. Jadi saya punya usul atau pikiran bagaimana kalau diadakan seragam pengajian khusus untuk pengajian kayak gitu loo mbak Hesti”. (Wawancara dengan Ibu R, tanggal 30 Maret 2016).

Data informasi dari wawancara tersebut menunjukkan adanya sikap aktif dalam hal memberikan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelompok kegiatan pengajian, terlepas idenya akan diterima atau tidak. Idenya untuk mengadakan seragam pengajian ibu-ibu mendapat respon yang baik oleh semua anggota yakni semuanya menyetujui ide tersebut. Akhirnya ide tersebut direalisasikan, sehingga setiap kegiatan pengajian berlangsung diwajibkan kepada masing-masing anggota untuk memakai seragam yang telah disepakati. Warna seragamnya adalah orange dengan corak bunga berwarna hijau. Untuk bentuk modelnya disamakan hanya saja mereka menentukan ukuran yang telah ditentukan (S, M, L, XL, XXL). Dengan adanya seragam pengajian menurut Ibu R akan membantu masyarakat untuk terlihat sama atau setara dengan lainnya tanpa memandang status sosial dan ekonomi keluarga. Disamping itu juga dirasa

lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi anggota untuk menghadiri pengajian.

Hal serupa juga dirasakan oleh anggota pengajian.

Partisipasi dan memberikan ide baru masih dirasa kurang untuk mendapatkan modal sosial sesuai dengan data-data informasi yang didapat di lapangan. Ibu R harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya serta memberikan ide-ide baru atau cara penyelesaian dalam kelompok yang tidak berpihak pada salah satu golongan. Disamping itu Ia juga harus berusaha bagaimana caranya meyakinkan masyarakatnya bahwa Ia layak untuk dijadikan seorang pemimpin di desanya, sehingga Ia diberikan kepercayaan untuk memimpin.

“Ketika pemilihan Pak M berlangsung, Pak M itu dulu pertama kali jadi lurah di sini. Ketika itu Pak M saya bantu. Saat itu kan pertama kali pemilihan lurah too mbak nah saat itu gambar calonnya bukan gambar orangnya yang mencalonkan diri seperti sekarang ini mbak, tapi digambarkan dengan lambang-lambang apa gitu seperti jagung dan padi. Saat itu Pak M digambarkan sebagai lambang padi. Pas konvoi itu saya ikut mbak, saya ikut mempromosikannya mbak. Soalnya istri Pak M itu masih saudara dengan saya. Saya ikut mempromosikan pada waktu itu dengan menggunakan *mic* dari dalam *pick up*, jadi ikut naik *pick up* keliling gitu, sambil teriak-teriak di *mic* itu mbak begini mbak (ayooo pilih gambar padi, jangan lupa yaa gambar padi, padi yang ngayomi lan mareki kita)”.
(Wawancara dengan Ibu R tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung tindakan yang dilakukan oleh Ibu R terhadap Pak M, menunjukkan bahwa Ibu R memiliki jiwa saling membantu sesamanya. Setelah periode kepemimpinan Pak M dan digantikan oleh Pak P, selanjutnya Ibu R.

Ketika proses persiapan sebelum hari pemilihan Ibu R, Ia mengharapkan adanya bantuan dari Pak M untuk mempromosikan dirinya meskipun cara berbeda dengan

yang Ia lakukan dulu ketika mempromosikan Pak M. Ibu R mempromosikan dirinya layak untuk dijadikan kepala desa saat di acara pengajian, sedangkan Pak M membantu mempromosikan Ibu R agar terpilih sebagai kepala desa melalui perkumpulannya di warung kopi dan teman-teman dekatnya.

Pak M memiliki kebiasaan yang dilakukannya setelah jam 19.00 WIB pergi ke warung untuk membeli kopi dan diminumnya di tempat. Tidak hanya sekedar minum kopi saja, tetapi Pak M juga melakukan interaksi dengan masyarakat yang datang ke warung milik Ibu Sundari. Alasan Pak M senang minum kopi di warung tersebut, karena banyak masyarakat yang datang ke sana untuk membeli kopi dan bercengkerama. Apalagi ketika ada acara sepakbola, banyak sekali yang datang untuk nonton bareng. Mengingat Pak M adalah masyarakat pendatang, sehingga dengan bercengkerama di warung menurutnya bisa membuatnya lebih mengenal dan akrab dengan masyarakat sekitar. Disela-sela ketika Pak M bercengkerama dengan masyarakat tersebut Ia mencoba mempromosikan Ibu R dengan segala kebaikan yang dimiliki oleh Ibu R. Ia meyakinkan masyarakat bahwa Ibu R layak menjadi sorang kepala desa. Berikut usaha yang dilakukan oleh Pak M untuk membantu mempromosikan Ibu R:

“...saya promosikan kebaikan Ibu R ke warga itu yaa baik, suka tolong menolong, ramah tamah, yaa cekatan, seneng kumpul-kumpul ke pengajian. Sama warga itu sangat dekat. Saya promosikan hanya yang pantas menajdi kepala desa ya seperti Ibu R itulah yaa sikapnya yang cekatan, tolong menolong, suka membantu warga, orangnya baik memang”. (Wawancara dengan Pak M, tanggal 15 Mei 2016).

Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara Ibu R dengan Pak M yakni keduanya saling membantu dalam memberikan dukungan.

Kebaikan yang dilakukan oleh Ibu R diingat selalu oleh Pak M, sampai akhirnya Ia membantu agar Ibu R terpilih seperti halnya Ia terpilih menjadi kepala desa PILKADES pertama di Pakuncen. Berbagai kegiatan dan sikap yang dimilikinya menunjukkan hasil dari terciptanya modal sosial. Ibu R merupakan salah satu orang yang dulunya mengumpulkan masa untuk memilih Pak M, sehingga pada periode pencalonannya menjadi kepala desa banyak orang-orangnya yang memihak beliau. Hal serupa diungkapkan juga oleh Ibu R bahwa Ia memiliki banyak kenalan masyarakat setempat mengingat memang Ia adalah orang asli Desa Pakuncen, sehingga orang-orang yang Ia kenal tersebut diajaknya untuk memilih Pak M pada PILKADES kali pertama di Desa Pakuncen (wawancara dengan Ibu R tanggal 22 Juni 2016).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah jaringan yang dimiliki oleh pihak terkait dalam hal ini adalah calon kepala desa dapat memberikan manfaat yang besar. Menurut Bordieu modal sosial secara langsung dapat memberikan manfaat kepada anggota jaringan di dalamnya. Anggota jaringan pada konteks ini adalah masyarakat yang dulunya orang-orang pilihan Ibu R untuk mendukung Pak M secara otomatis akan memberikan dukungan kepadanya. Hal tersebut dikarena dalam hubungan sosial senantiasa ada timbal balik antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok dan sebaliknya.

Modal sosial menurut Bordieu berperan untuk menggantikan atau menutupi kekurangan sumber yang lain (Bordieu dalam John Field, 2014: 121).

Modal sosial menurut John Field yang menekankan pada dua kata yakni “soal hubungan”, senada dengan hasil penelitian di lapangan. Terbukti bahwa Ibu

R menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat khususnya di Desa Pakuncen.

Ia membangun hubungan yang baik melalui berbagai kegiatan yang selalu diikutinya. Ia juga membangun hubungan baik dengan masyarakat dengan sikap ramahnya menyapa setiap masyarakat yang ditemuinya. Terbukti ketika mengantarkan saya ke rumah salah satu masyarakat yang akan saya tempati selama penelitian. Ia menyapa salah satu masyarakat yang sedang makan di teras rumahnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan:

“Monggo! Masak opo wii arep aku”. (Kalimat yang dilontarkan kepada salah satu masyarakat Desa Pakuncen oleh kepala desa, tanggal 18 Maret 2016).

Hubungan dengan sesamanya yang telah kepala desa lakukan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dijelaskan di atas bahwa kepala desa telah berpartisipasi dalam kelompok yang diadakan oleh desa sejak masih muda bahkan sebelum menikah. John Field berpendapat bahwa hubungan tersebut akan membantu seseorang dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan, karena seseorang tidak dapat mencapai dengan upaya sendiri tanpa bantuan orang lain khususnya yang ada di sekitarnya. Pendapat John terbukti di lapangan yakni Ibu R tidak dapat terpilih menjadi kepala desa dengan sendiri. Ia dibantu oleh Pak M dalam hal mempromosikan dirinya agar memenangkan kedudukan sebagai kepala desa di Desa Pakuncen.

Menurut John Field dalam bukunya yang berjudul modal sosial, melalui serangkaian jaringan orang dapat melakukan hubungan, sejauh mana hubungan tersebut akan menjadi sebuah daya maka dapat dikatakan sebagai modal sosial. Pendapat tersebut memang benar, karena dengan hal tersebut dapat membantu Ibu

R lebih dikenal oleh masyarakatnya yang nantinya akan memilih dalam PILKADES. Hubungan sosial dituntut ada pada setiap kegiatan atau cara yang menentukan seseorang untuk menang atau tidak dalam meraih cita-cita. Cita-cita dalam penelitian lapangan di Desa Pakuncen adalah mendapatkan kekuasaan pada politik tingkat desa. Kekuasaan tertinggi di desa yang mampu memimpin masyarakat desa yakni sebagai kepala desa. Hubungan sosial telah dilakukan oleh Ibu R selaku tokoh yang bersangkutan. Ia membangun hubungan sosial baik dengan masyarakat Desa Pakuncen. Ia melakukannya sebelum diangkat menjadi kepala desa. Data di lapangan mengatakan bahwa sejak berusia remaja Ia dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, aktif dalam organisasi, dan memiliki sopan santun yang baik dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi masyarakat. Selain sikap baik yang dimiliki olehnya, Ia juga memiliki prestasi yang dinilai baik oleh masyarakat, sehingga dipercaya dapat melaksanakan tugas sebagai kepala desa dan dijadikan panutan.

Posisi yang baik seperti menjadi ketua karang taruna dan sekretaris PKK merupakan salah satu faktor pendukung yang dilakukan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan kepala desa, selain itu sikap ramah dan sebagainya yang dimiliki oleh Ibu R menunjukkan bahwa kepribadiannya baik. Kedua hal tersebut saling mendukung satu sama lain untuk menentukan menang atau tidaknya Ibu R menjadi seorang kepala desa. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan kesamaan dengan apa yang dikatakan oleh John Field sebagai berikut:

“Teori modal sosial, pada intinya merupakan teori yang paling tegas. Tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata: soal hubungan. Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaga agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, atau yang dapat mereka capai tapi dengan susah payah” (Field, 2014: 1).

4.3 Antusias Masyarakat dalam PILKADES

Antusias dari masyarakat setempat untuk meramaikan PILKADES sangat tinggi, terlihat dari orang yang berpartisipasi dalam memberikan suaranya lebih besar dibanding suara yang kosong atau tidak hadir dengan alasan tertentu pada periode pertama Ibu R tahun 2009, seperti halnya yang terjadi pertama kali diadakan PILKADES tahun 1992. Pada saat itu masyarakatnya masih berjumlah sekitar 40 KK dengan jumlah usia pemilihnya (17 tahun ke atas). Jumlah KK pada tahun tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode pemilihan kepala desa tahun 2009 yang dimenangkan oleh Ibu R berjumlah sekitar 60 KK. Sedangkan pada periode kedua tahun 2014 antusias dari masyarakat juga masih banyak hanya 15 orang. Intensitas dari antusias masyarakat setempat untuk memberikan suaranya sangat menentukan keberhasilan atau kemenangan seorang calon kepala desa. Masing-masing periode memiliki antusias PILKADES yang berbeda. Pada periode kemenangan Pak M ramai dengan adanya konvoi keliling desa yang dilakukan oleh kedua calon, begitu juga pada periode selanjutnya yang dimenangkan oleh Pak P.

Pesta demokrasi tersebut berbeda pada saat periode kemenangan Ibu R. Pada periode pertama tahun 2009. Pada saat itu ada tiga calon kepala desa yakni Pak Sb, Ibu R, dan Ibu D. Hanya ada satu calon kepala desa yang melakukan konvoi untuk mempromosikan dirinya. Konvoi tersebut dilakukan oleh lawannya

yakni Pak P, Ibu R tidak melakukan konvoi, sedangkan Ibu D hanya melakukan doa bersama yang diadakan di rumahnya dengan mengundang semua masyarakat Desa Pakuncen. Ibu R mempromosikan dirinya sebagai calon kepala desa nomor urut dua melalui suatu perkumpulan yakni ibu-ibu pengajian dan ibu-ibu PKK, disamping dengan bantuan dari keluarganya. Penghasilan suara yang diperoleh Pak Sb nomor urut satu sebanyak 52 suara, sedangkan Ibu R nomor urut dua sebanyak 61 suara, dan Ibu D nomor urut tiga sebanyak 42 dengan jumlah surat suara sebanyak 155 surat suara. Pada masa jabatannya yang kedua tahun 2014 Ibu R dengan urutan nomor satu mendapat 108 suara, sedangkan nomor urut dua yang ditempati oleh Pak P mendapat 88 suara dengan jumlah surat suara sebanyak 211, jadi ada 15 orang tidak mengikuti PILKADES, disebabkan oleh remaja yang sedang melakukan kerja dan melanjutkan pendidikan ke luar kota.

Terpilihnya Ibu R menjadi kepala desa selama dua periode ini, Ia mencetak sejarah baru yakni pertama kalinya Desa Pakuncen dipimpin oleh seorang perempuan. Disamping itu pertama kalinya juga Desa Pakuncen dipimpin oleh orang yang berasal dari masyarakat setempat atau putra daerah setelah dilaksanakannya PILKADES, karena kepala desa sebelumnya berasal dari desa tetangga seperti Pak M berasal dari Desa Patianrowo dan Pak P dari Desa Nglawak hanya saja istri mereka berasal dari Desa Pakuncen.

Permasalahan dalam politik tidak banyak dipahami oleh masyarakat, karena tidak paham makna dari politik itu sendiri. Menurut Mariam Budiardjo (2008: 15) politik adalah proses dan usaha bagaimana membuat dan menentukan peraturan-peraturan yang lebih baik, sehingga dapat diterima warga dan

menjadikan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Bagi mereka yang tidak paham akan makna politik tersebut, maka mereka dapat menilai seseorang berdasarkan bagaimana sikap yang dimiliki oleh tokoh bersangkutan yakni Ibu R terhadap orang lain. Sikap yang dimilikinya akan dijadikan patokan oleh mereka untuk menentukan pilihannya. Senada dengan pendapat John Field yang mengutip sebuah pameo atau peribahasa:

“Yang penting bukanlah apa yang kamu ketahui, namun siapa yang kamu kenal. Artinya, apa dan siapa yang Anda kenal dan ketahuilah yang bermanfaat” (Field. 2014: 3).

Menurut John Field dalam sebuah jaringan yang penting bukan apa yang kamu ketahui, tetapi siapa yang kamu kenal. Dari sikap ramah dan supel itu orang akan mengenal Ibu R. Menurut John Field banyaknya orang yang anda kenal belum tentu orang lain merasa harus membantu Anda, maka Anda harus membuatnya yakin dan percaya sehingga bersedia membantu. Salah satu cara yang dapat dilakukan menurut John Field yakni menunjukkan kesamaan nilai dan norma dengan begitu orang akan bersedia membantu. Hal ini terjadi pada kasus Ibu R, Ia tidak mungkin dapat melakukan segala kegiatan ketika persiapan pemilihan kepala desa. Pasti Ia membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekatnya, orang yang mereka kenal, teman, dan keluarga. Misalnya, Ia dibantu suaminya mulai awal pendaftaran hingga terpilih istrinya menjadi kepala desa, meminta bantuan kepada Pak M untuk mempromosikan dirinya sebagai salah satu calon kepala desa, Ia juga meminta bantuan kepada masyarakat Pakuncen yang menjadi anggota pengajian untuk memilihnya. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat John Field, menurutnya cara tersebut dianggap lebih cepat membuahkan hasil.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data temuan lapangan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dan penggunaan modal sosial oleh kepala desa, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Politik lokal di Desa Pakuncen dulunya sangat tergantung pada garis keturunan atau *liniages* dengan garis keturunan laki-laki (patrilineal) berubah menjadi demokrasi setelah adanya UUD RI No. 5 Tahun 1979 Pasal 5. Salah satu persyaratan bagi pencalon kepala desa yang diatur dalam UUD tersebut pasal 4, menunjukkan bahwa pencalonan kepala desa tidak harus laki-laki, tetapi perempuan juga memiliki peluang untuk mencalonkan diri. Peraturan tersebut membuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah di ranah politik.

Terjadi pergeseran kekuasaan pada juru kunci yang awalnya menjadi penguasa tunggal, setelah adanya peraturan pemerintahan desa juru kunci tidak lagi menjadi kepala desa. Hal tersebut dikarenakan posisi kepala desa ditempati oleh masyarakat setempat yang tidak harus berasal dari keturunan langsung Kyai Nurjalipah mulai tahun 1992. Pada tahun 2009 hingga sekarang dipimpin oleh seorang perempuan selama dua periode berturut-turut yang sebelumnya adalah laki-laki. Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan yang sangat terlihat. Di bawah kepemimpinan perempuan Desa Pakuncen mengalami perubahan yang sangat signifikan bagus.

Karakter yang dimiliki oleh Ibu R selaku kepala desa perempuan diantaranya sabar dan luwes tersebut membuat masyarakat antusias mensukseskan berbagai kegiatan dan program yang telah dibuatnya. Dilihat dari segi pelayanan administrasi diberikan dengan baik. Disamping pelayanan non-administrasi pembangunan infrastruktur desa dengan tujuan memajukan Desa Pakuncen, Kepala desa perempuan juga berhasil dengan baik melaksanakannya. Salah satunya yakni Desa Wisata yang mengambil tema sejarah dan religi berdasarkan petilasan bersejarah yang berada di Desa Pakuncen.

Modal sosial yang dimiliki kepala desa perempuan berawal dari kegemarannya mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Desa Pakuncen seperti karang taruna, arisan, pengajian, dan PKK. Kepala desa perempuan menggunakan modal sosial yang dimilikinya dengan baik dan memiliki strategi baik dalam mendapatkan dukungan yakni dengan membagikan kerudung yang merupakan simbol Agama Islam, hingga akhirnya Ia memenangkan kekuasaan posisi politik lokal sebagai kepala desa. Usaha yang Ia lakukan ketika mendapatkan posisi tersebut ketika masa pra PILKADES Ia tidak melakukan konvoi, tetapi meminta doa dan dukungan ke masyarakat dengan cara *door to door* dan kepada anggota organisasi yang ada di desa. Disamping itu kepala desa perempuan ini dibantu oleh kepala desa laki-laki periode pertama PILKADES di Desa Pakuncen, karena ada hubungan timbal balik diantaranya. Hubungan timbal balik yang dimaksud adalah kegiatan promosi atau pengenalan calon kepala desa kepada masyarakat setempat.

5.2 Saran

Saran oleh penulis yakni:

1. Bagi kepala desa, dengan penuh kesabaran diharapkan dapat lebih memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa Pakuncen.

Kepala desa lebih mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan program-program pada sisa kepemimpinan di periode dua ini, sehingga program yang sudah dibuat atau sedang dalam proses pelaksanaan dapat terealisasi dengan baik. Kepala desa juga harus lebih tegas dalam memimpin tidak boleh terlalu mendahulukan ego atau perasaan.

2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan rasa antusias terhadap program-program yang diadakan oleh kepala desa, sehingga bisa berjalan dengan baik. Terutama pada program yang baru saja terealisasi yakni Desa Pakuncen dijadikan sebagai desa wisata. Hasilnya diharapkan memberi dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat.

3. Bagi jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk, lebih memperhatikan Desa Pakuncen, karena desa ini merupakan cikal bakal berdirinya Kertosono. Agar masyarakat sekitar dan masyarakat luas mengerti sejarah tersebut.

4. Bagi akademisi, untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan pada sektor pariwisata yang baru diresmikan di Desa Pakuncen dan hubungan politik desa dengan jajaran pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Astuti, Tri Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*.
Semarang: Unnes Press.

Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.

Buku Administrasi Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
Tahun 2015.

Field, John. 2014. *Modal Sosial (Social Capital)*. Nurhadi (Ed). Bantul: Kreasi
Wacana.

Hadiz, Liza (ed). 2004. *Partisipasi Perempuan dan Kesetaraan Politik Gender
dalam Pembangunan* dalam kumpulan jurnal *Perempuan dalam Wacana
Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia.

Halim, Abd. 2014. *Politik Lokal*. Yogyakarta: LP2B (Lembaga Pengkajian
Pembangunan Bangsa).

Ismawati, Esti. 2005. *Transformasi Perempuan Jawa*. Surakarta: Pustaka Cakra.

Jaweng, Endi Robert. 2014. *Infrastruktur, Integritas, dan Prestasi Perempuan
Kepala Daerah: Perspektif Politik* dalam jurnal *Perempuan untuk
Pencerahan dan Kesetaraan* Vol. 19. No. 4 November 2014

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kartono, Kartini. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan
Abnormal itu?*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurtz, V., Donald. 2001. *Politik Anthropology Power and Paradigms*. United State of America: Westview Press

Lisa Bona Rahman dan Wdriana Noerdin, ed. 2005. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute.

Luthfi, Asma dan Atika Wijaya. 2011. Persepsi Masyarakat Sekarang Tentang Konservasi Lingkungan. *Jurnal Komunitas*, Vol. 3 No. 1.

Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerjemah Tjetjep Rohendi R. UI Press.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintahan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang penghapusan tanah perdisan.

Remiswal. 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sihite, Romani. 2007. Perempuan Kesetaraan, keadilan, suatu tinjauan berwawasan jender. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudijono, Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press

Lampiran 1: Berita Acara Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang, 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575857 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id <http://www.fib.ub.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Hesti Triyana Sulistyani
2. NIM : 125110800111035
3. Program Studi : S-1 Antropologi
4. Topik Skripsi : Antropologi
5. Judul Skripsi : Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan
Dalam Politik Lokal Di Desa Pakuncen Kecamatan
Patianrowo Kabupaten Nganjuk
6. Tanggal Mengajukan : 28 November 2015
7. Tanggal Selesai Revisi : 25 Juli 2016
8. Nama Pembimbing : Manggala Ismanto, M.A
9. Keterangan Konsultasi

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1.	28 November 2015	Pengajuan judul skripsi	Manggala Ismanto, M.A	
2.	30 November 2015	Perencanaan penelitian lapangan awal	Manggala Ismanto, M.A	
3.	20 Desember 2015	Survey lapangan	Manggala Ismanto, M.A	
4.	21 Desember	Hasil observasi	Manggala Ismanto,	

	2015	lapangan awal	M.A	
5.	23 Desember 2015	Konsultasi hasil temuan lapangan awal	Manggala Ismanto, M.A	
6.	24 Desember 2015	Pengajuan metode penelitian dan konsultasi penggunaan teori	Manggala Ismanto, M.A	
7.	25 Desember 2015	Pengajuan <i>out line</i> BAB I	Manggala Ismanto, M.A	
8.	30 Desember 2015	Pengajuan proposal BAB I	Manggala Ismanto, M.A	
9.	8 Januari 2016	Revisi BAB I	Manggala Ismanto, M.A	
10.	20 Januari 2016	ACC Proposal	Manggala Ismanto, M.A	
11.	27 Januari 2016	Seminar Proposal	Manggala Ismanto, M.A	
			Edlin Dahniar Al-Fath M.A	
12.	Maret-April	Penelitian lapangan dilaksanakan	Manggala Ismanto, M.A	
13.	26 April 2016	Pengajuan <i>out line</i> BAB II dan konsultasi hasil temuan lapangan terkait fokus penelitian	Manggala Ismanto, M.A	

14.	30 April 2016	Pengajuan proposal BAB II	Manggala Ismanto, M.A	
15.	10 April 2016	Revisi BAB II	Manggala Ismanto, M.A	
16.	25 April 2016	Pengajuan BAB III	Manggala Ismanto, M.A	
17.	30 April 2016	Revisi BAB III	Manggala Ismanto, M.A	
18.	05 Mei 2016	Pengajuan BAB IV dan V	Manggala Ismanto, M.A	
19.	25 Mei 2016	Revisi BAB IV dan V	Manggala Ismanto, M.A	
20.	1 Juni 2016	Pengajuan BAB I-V	Manggala Ismanto, M.A	
21.	6 Juni 2016	Revisi BAB I-V	Manggala Ismanto, M.A	
22.	11 Juni 2016	ACC Seminar hasil	Manggala Ismanto, M.A	
23.	20 Juni 2016	Seminar Hasil	Manggala Ismanto, M.A	
			Edlin Dahniar Al-Fath M.A	
24.	15 Juli 2016	Revisi	Manggala Ismanto, M.A	
25.	21 Juli 2016	Ujian skripsi	Manggala Ismanto, M.A	
			Edlin Dahniar Al-Fath M.A	

26.	25 Juli 2016	Revisi akhir	Manggala Ismanto, M.A.	
-----	--------------	--------------	---------------------------	---

Telah di evaluasi dan diuji dengan nilai :



Malang, 25 Juli 2016

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi

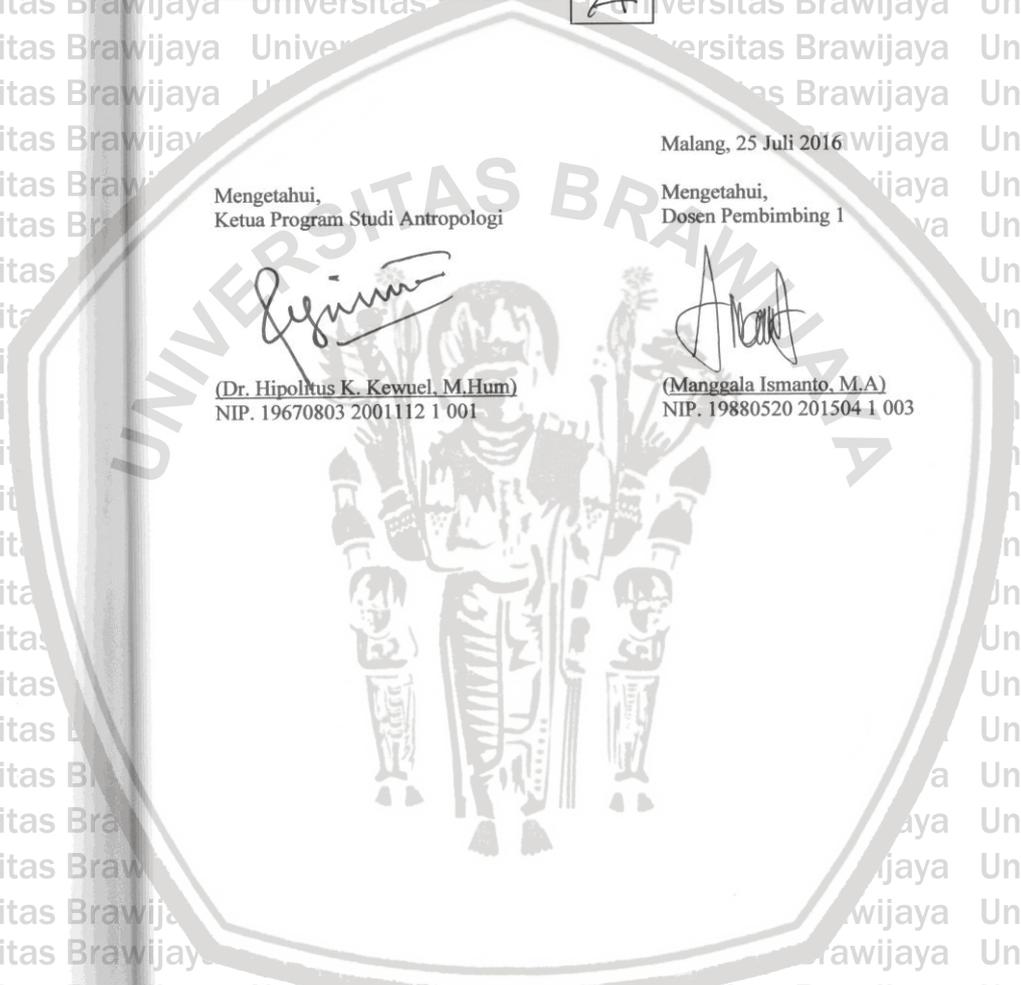
Mengetahui,
Dosen Pembimbing 1





(Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum)
NIP. 19670803 2001112 1 001

(Manggala Ismanto, M.A)
NIP. 19880520 201504 1 003



Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama Lengkap : Hesti Triyana Sulistyani
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 14 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Putih RT/RW 03/02 Kecamatan
Gampengrejo
Kabupaten Kediri
Email : hestitriyana2@gmail.com

Pendidikan Formal :

1998-2000 : TK DHARMA WANITA DESA PUTIH
2000-2006 : SD NEGERI 1 DESA PUTIH
2006-2009 : SMP NEGERI 2 GAMPENGREJO
2009-2012 : SMA NEGERI 1 PAPAR
2012-2016 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Lampiran 3: Surat Pernyataan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341-575875, Fax. +62341-575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id ; http://www.fib_ub.ac.id

Surat Pernyataan

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hesti Triyana Sulistyanti
NIM : 125110800111035
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi Program S1 saya yang berjudul:

"PENGUNAAN MODAL SOSIAL PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUR"

akan menjaga kerahasiaan data yang saya peroleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya akan etika penelitian yang berlaku.

Tanggal pernyataan: 1 Desember 2013

Yang membuat pernyataan:



Hesti Triyana Sulistyanti
125110800111035

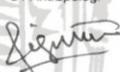
Mengetahui:

Dekan



Prof. Ir. Ratiya Anindita, M.S., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

Ketua Program Studi
S1 Antropologi



Dr. Hippolitus K. Kewuel
NIP. 19670803 200112 1 001

Lampiran 4: Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib_ub.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : 27 Januari 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : Hesti Triyana Sulistyani

N I M : 125110800111035

Prodi : Antropologi

Dengan judul :

“Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan dalam Politik Lokal

Di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk”

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Manggala Ismanto M. A.
2. Pembimbing II : _____
3. Peserta umum sejumlah : orang (terlampir)

Pembimbing I

Malang,
Pembimbing II

(Manggala Ismanto M.A.)

NIP. 19880520 201504 1 003

(_____)
NIP.

Pembantu Dekan I,

(Syariful Mujaqin, M.A.)

NIP. 19761101 200312 1 001

Untuk Mahasiswa

Lampiran 5: Surat Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65135, Indonesia, Telp. +62341-575875; Fax. +62341-575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id ; http://www.fib_ub.ac.id

Malang, 01 FEB 2016

Nomor : 0163/JUN10.12/AK/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Jalan Supriyadi nomor 5
Nganjuk, Jawa Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

Nama : Hesti Triyana Sulistiyani
NIM : 125110800111035
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

"PENGUNAAN MODAL SOSIAL PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK"

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.

Dekan,

Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

Tembusan : Yth.

1. Camat Patianrowo
2. Kepala Desa Pakuncen
3. Ketua RT/RW Desa Pakuncen

Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO**

DESA PAKUNCEN

Jalan : Masjid Nomor 01 Desa Pakuncen Kode Pos.64391

Nomor : 140/002/411.510.08/2016

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan

Telah Mengadakan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pakuncen memberi ijin penelitian kepada:

Nama : Hesti Triyana Sulistiyani
 Nomor Induk Mahasiswa : 125110800111035
 Angkatan/ Semester : 2012/ 8
 Fakultas/ Universitas : Fakultas Ilmu Budaya/ Universitas Brawijaya Malang
 Jurusan : Antropologi

Telah mengadakan penelitian di Desa Pakuncen sebagai acuan (pengumpulan data-data) dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

**“PENGUNAAN MODAL SOSIAL PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK
LOKAL DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN
NGANJUK”**

Demikian surat izin ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 7: Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**
 Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
 Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbang_Ngk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/25/411.308/2016

- Perhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Universitas Brawijaya Malang, tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 0162/UN10.12/AK/2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : HESTI TRIYANA SULISTYANI
 Status : Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang.
 Alamat : Jalan Veteran Malang.
 Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.
 Judul/Tema : "PENGUNGAN MODAL SOSIAL PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGAJUK"
 Lokasi Kegiatan : Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
 Lama Kegiatan : 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan.
 Pengikut dalam kegiatan :

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Menjalani ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, keselamatan dan kesucilaan serta menghindari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Desa Pakuncen.

Nganjuk, 7 Februari 2016
 KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS
 DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19631112 198504 1 002

Terbilang disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Bapemas pemdes Kab.Nganjuk Kecamatan Patianrowo.
4. Hesti Triyana Sulistyani

Lampiran 8: Berita Acara Seminar Hasil Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib_ub.ac.id

Untuk Mahasiswa

BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Senin, 20 Juni 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : Hesti Triyana Sulistyani

NIM : 125110800111035

Prodi : Antropologi

Dengan judul:

Penggunaan Modal Sosial Pemimpin Perempuan dalam Politik Lokal

Di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Manggala Ismanto M.A
2. Pembimbing II : _____
3. Penguji : _____
4. Peserta : 1 orang (terlampir)

Pembimbing I

Malang,

Pembimbing II

(Manggala Ismanto M.A)
NIP. 19860520 20154 1 003

NIP. _____

Pembantu Dekan I,



(Syarifur Muttaqin, M.A.)
NIP. 19751101 200312 1 001

Lampiran 9: Ujian Skripsi

**BUKTI PENDAFTARAN
UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FORM
SEMIPAR**

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Hesti Triyana Sulistyani

N.I.M : 125110800111035

Program : Antropologi

Benar-benar telah mendaftarkan diri untuk mengadakan Ujian Skripsi dan yang bersangkutan :

() telah melengkapi

() belum melengkapi

persyaratan administrasi dan akademik sesuai daftar formulir pendaftaran.

Malang, 21 JULI 2016
Yang menerima pendaftaran

UJIAN SKRIPSI



Lampiran 10: Dokumentasi



Gambar 1 Kantor Balai Desa Pakuncen



Gambar 2 Kantor KUA



Gambar 3 Aula Desa



Gambar 4 Gedung Sekolah TK. Islam Al-Qomar



Gambar 5 Gedung Sekolah SMPIT



Gambar 6 Gedung Sekolah MA Sunan Kalijaga



Gambar 7 MAK Sunan Kalijogo Pakuncen



Gambar 8 SMKIT (Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu) Al-Qomar



Gambar 9 Home Industry Penjual Produk Sophie



Gambar 10 Warung Kopi



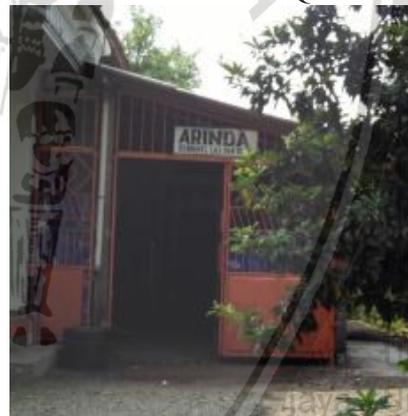
Gambar 11 Warung Makan dan Foto Copy



Gambar 12 Pembuatan Jamu Al-Qomar



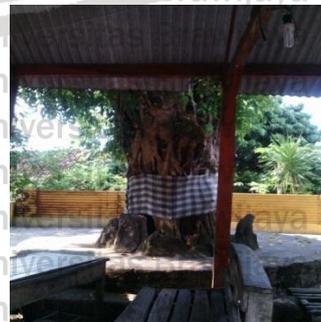
Gambar 13 Penjual Jajanan Anak-anak



Gambar 14 Bengkel Las



Gambar 15 Tugu bersejarah sebagai cikal bakal Kertosono



Gambar 16 Beringin Bersejarah Konon Dijadikan sebagai Tempat Hukum Mati



Gambar 17
Masjid Baiturohman



Gambar 18
Pintu Masuk Makam Umum



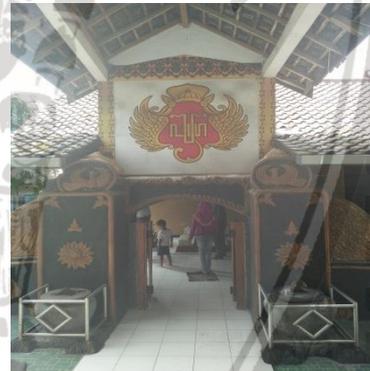
Gambar 19
Makam Umum yang Berada di Belakang
Masjid Baiturohman



Gambar 20
Makam Keluarga Agung Mataram



Gambar 21
Salah Satu Maisan yang Menunjukkan
Keberadaannya Sebelum Kemerdekaan RI



Gambar 22
Gentong Bersejarah Konon Memiliki Kekuatan
Goib



Gambar 23
Jembatan Lama Kertosono



Gambar 24
Kegiatan Kerja Bakti



Gambar 25
Rumah Usaha



Gambar 26
Wawancara dengan Pak D, Ibu Ko, Ibu Ka



Gambar 27
Nampak keadaan lingkungan desa yang bersih



Gambar 28
Arsitektur Masjid



Gambar 29

Jalan Desa Pakuncen yang Sudah Dipaving



Gambar 30

Foto dengan Juru Kunci Makam



Gambar 31
Ponpes Al-Qomar



Gambar 32
Foto Dengan Jajaran Staff Pembantu Desa Pakuncen

